

# 30.551\*

Total SDM

Dengan Rincian

## 50

Hakim Agung

## 8.664

Jurusita

## 68

Hakim Tinggi Yustisial

## 3.070

Panitera

## 178

Hakim Yustisial

## 906

Jabatan Fungsional

## 8.273

Hakim

## 9.342

Tenaga Non Teknis

\*Data per 31 Desember 2021



Transformasi unit Kepegawaian Mahkamah Agung dari pengelola administratif menjadi rekan bisnis bagi organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, membuat Sumber Daya Manusia (SDM) di Mahkamah Agung dianggap sebagai aset utama penggerak organisasi yang perlu dikelola secara tepat dan komprehensif. Salah satu pencapaian Mahkamah Agung dalam pengelolaan SDM adalah pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan sebagai pilihan jenjang karir bagi pegawai di Kepaniteraan Mahkamah Agung. Unit penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) Mahkamah Agung RI juga telah mendapatkan pengakuan kelayakan/akreditasi dari Badan Kepegawaian Negara sebagai penyelenggara penilaian kompetensi **Kategori “B”**. Di tahun 2021, jumlah SDM yang dikelola mencapai 30.551 orang terdiri dari 20.303 orang tenaga teknis (Hakim dan Kepaniteraan), 9.342 tenaga non teknis (kesekretariatan) dan 906 jabatan fungsional yang tersebar di 917 satuan kerja di seluruh Indonesia.

## PROGRAM PEMBARUAN

Persaingan global saat ini menjadi penting bagi Mahkamah Agung untuk memiliki *Smart ASN* yang memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, penguasaan IT dan bahasa asing, jiwa *hospitality dan entrepreneurship*, serta memiliki jaringan luas untuk mewujudkan "Badan Peradilan Indonesia yang Agung" yang berkelas dunia. Mahkamah Agung juga fokus pada pendekatan pengelolaan SDM sebagai aset yang dikenal sebagai *human capital*. Salah satu contoh konkret di dalam pengelolaan SDM di Mahkamah Agung berbasis *human capital* adalah membentuk Manajemen Talenta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memberikan opsi pengelolaan sumber daya manusia (SDM), seperti mengenali potensi dan kompetensi serta manajemen kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

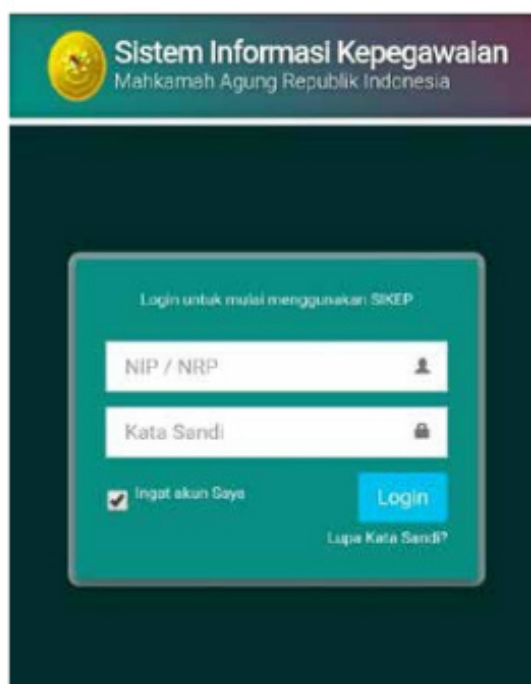
Seluruh pengelolaan SDM tercatat dalam satu sistem informasi kepegawaian (SIKEP) yang terintegrasi dengan sistem lainnya yang ada di Mahkamah Agung sehingga seluruh datanya dapat dimanfaatkan oleh pimpinan Mahkamah Agung dalam pengambilan kebijakan. Inovasi dan peningkatan sistem pengelolaan SDM Mahkamah Agung terus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan cara sebagai berikut.

### SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIKEP)

SIKEP merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data kepegawaian pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya sejak diluncurkan tahun 2018. Selain untuk mengelola data kepegawaian, data SIKEP banyak dimanfaatkan untuk memberikan layanan kepegawaian secara *less paper*. Adapun kegiatan yang dilakukan terkait pengembangan SIKEP pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

#### 1) Sinkronisasi data pegawai SIKEP-SAPK BKN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seluruh instansi diwajibkan untuk mengintegrasikan data kepegawaiannya yang ada pada setiap sistem dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN. Untuk melakukan integrasi data, perlu dilakukan proses rekonsiliasi, sinkronisasi, integrasi dan pemantauan. Rekonsiliasi dan sinkronisasi dilakukan apabila struktur data SIKEP dengan SAPK BKN tidak sama. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2021 unit kepegawaian Mahkamah Agung melakukan proses rekonsiliasi dan sinkronisasi guna mengintegrasikan data dan mendapatkan layanan kepegawaian yang lebih maksimal. Integrasi yang dilakukan terdiri atas *profiling* tabel data utama serta perancangan proses bisnis data utama pegawai antara SAPK dan SIKEP. Berikut jumlah data yang dilakukan rekonsiliasi ke sistem BKN.



Tabel Rekonsiliasi Data SIKEP dengan SAPK

No.	Kegiatan	Jenis Data	Jumlah (row)
1.	Pemetaan tabel referensi SAPK dan SIKEP	Data UNOR SAPK dengan data struktur organisasi SIKEP	8.920
		Data referensi JFT dan JFU di SAPK dengan data referensi jabatan di SIKEP	333
		Pemetaan referensi eselon	8
		Pemetaan referensi agama	7
		Pemetaan referensi tingkat pendidikan	10
		Pemetaan referensi propinsi	87
		Pemetaan referensi kabupaten	523
		Pemetaan referensi kecamatan	1.000
2.	Rekonsiliasi data tabel referensi SAPK dan SIKEP	Rekonsiliasi data referensi jabatan fungsional umum SAPK dengan SIKEP	89
		Rekonsiliasi data referensi jabatan fungsional tertentu BKN dengan SIKEP	10
		Pembuatan tabel Pemetaan Id Unor Wakil Ketua Pengadilan dengan Id Struktur Organisasi SIKEP	913
		Pembuatan tabel Pemetaan nama jabatan hakim pada SAPK dengan SIKEP	14
3.	Rekonsiliasi data SAPK dan SIKEP	Pegawai Nonaktif (di SAPK masih aktif)	1.255
		Rekonsiliasi data jabatan dan unor	26.862
		Rekonsiliasi data SKP 2020	22.403
		Rekonsiliasi data SKP 2019	25.700
		Rekonsiliasi data jabatan	534
	Rekonsiliasi data pendidikan	35	

2) Pengembangan Modul Penghargaan Satya Lencana  
Pengusulan penghargaan satya lencana membutuhkan informasi data penghargaan yang cepat dan akurat. Guna mempermudah pengelola kepegawaian pada setiap satuan kerja, dibangun modul pengelolaan proses usul penghargaan satya lencana. Modul ini dapat memprediksi pegawai yang akan memperoleh penghargaan sesuai dengan persyaratan untuk selanjutnya divalidasi oleh setiap pengelola kepegawaian sebagai proses verifikasi usulan. Pada tahun 2021 modul ini mengelola 5.344 data pegawai untuk diusulkan mendapatkan penghargaan satya lencana.

3) Sinkronisasi data Pegawai Sikep-Sitara Tapera  
Dengan mengalihkan Bapertarum ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera), data kepesertaan yang dikelola oleh Bapertarum sebelumnya akan dikelola

oleh BP Tapera. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap instansi perlu melakukan proses sinkronisasi data dengan sistem kepesertaan yang dimiliki oleh BP Tapera, yaitu Sitara. Pada tahun 2021 sejumlah 28.447 data pegawai pada Sikep telah disinkronisasikan ke Sitara.

4) Pengembangan modul Pengangkatan CPNS-PNS  
Guna mempercepat pengusulan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) formasi tahun 2019 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta guna memanfaatkan data dan dokumen elektronik yang telah tersedia pada SIKEP, dikembangkan Modul Pengangkatan CPNS-PNS untuk memproses pengusulan CPNS-PNS formasi tahun 2019 sejumlah 452 CPNS di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

## PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI

Dalam pandangan *human capital management* (HCM), sumber daya manusia (SDM) dianggap sebagai aset bagi organisasi yang harus dikelola dan dikembangkan dengan baik sebagai sebuah investasi bagi organisasi. Melalui pengelolaan dan pengembangan aset SDM, diharapkan investasi tersebut dapat kembali kepada organisasi atau memiliki nilai *return of investment* yang lebih tinggi. Sebagai dasar pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang membutuhkan pengukuran secara komprehensif mengenai pengetahuan, kemampuan, sikap, dan perilaku dari setiap individu diperlukan adanya standar kompetensi.

Standar kompetensi jabatan yang digunakan oleh Mahkamah Agung adalah kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Standar kompetensi manajerial dan sosiokultural ASN telah diatur secara nasional dalam peraturan menteri tersebut, sedangkan standar kompetensi teknis dibuat oleh kementerian dan lembaga masing-masing sesuai dengan jabatan yang ada di kementerian dan lembaga tersebut.

Mahkamah Agung memiliki kewajiban menyusun standar kompetensi sesuai dengan fungsi utama lembaga, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Langkah-langkah penyusunan standar kompetensi teknis dilakukan sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

- melakukan diskusi kelompok terpumpun (DKT) atau *focus group discussion* (FGD) dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penyusunan standar kompetensi teknis bidang tugas Mahkamah Agung sesuai dengan fungsinya sebagai Lembaga peradilan;
- melakukan DKT dengan perwakilan dari setiap Direktorat Jenderal yang berada di bawah Mahkamah Agung terkait penyusunan kamus kompetensi teknis perkara dan persidangan;

- menganalisis fungsi Mahkamah Agung guna memperoleh *output* dan *outcome* yang digunakan untuk mengidentifikasi kompetensi teknis jabatan;
- mengategorisasikan fungsi Mahkamah Agung menjadi 6 bidang kekhususan, yaitu kebijakan, hukum materiel, hukum formil, administrasi perkara, pengawasan, dan pemberian pertimbangan;
- merumuskan definisi dari setiap bidang kekhususan tersebut untuk diturunkan menjadi 26 (dua puluh enam) kompetensi;
- mendeterminasi kompetensi berdasarkan tingkat kemahiran yang dibagi menjadi 5 kategori kemahiran; dan
- menetapkan indikator perilaku dari setiap tingkat kemahiran.

Tahap selanjutnya adalah penetapan Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Teknis Perkara dan Persidangan Mahkamah Agung RI menjadi regulasi yang dijadikan pedoman untuk penilaian kompetensi teknis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

## ASSESSMENT CENTER

Unit Penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) Mahkamah Agung RI ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 7/KMA/SK/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pembentukan Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung RI terletak di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12 Jalan Jend. Ahmad Yani Kav. 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.



Gambar Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi

Sejak diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Assessment Center Mahkamah Agung RI telah menjalankan fungsinya dengan melakukan penilaian kompetensi untuk pengisian jabatan dan pemetaan kompetensi, baik yang dilaksanakan oleh unit penilaian kompetensi sendiri maupun bekerja sama dengan lembaga penilaian kompetensi eksternal. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/BKN/IX//2021 tanggal 01 September 2021, Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung RI, telah memenuhi kesesuaian standar kelayakan penyelenggara penilaian kompetensi dengan kategori "B". Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung RI memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penilaian kompetensi, baik untuk internal Mahkamah Agung maupun untuk memenuhi kebutuhan penilaian kompetensi pada instansi lain.

Kegiatan Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung RI tidak terbatas hanya pada penilaian dan pemetaan kompetensi, tetapi mencakup pemberian umpan balik sebagai dasar pengembangan pegawai yang selanjutnya akan diintegrasikan untuk pengelolaan SDM berbasis kompetensi. Hasil penilaian dan pemetaan kompetensi digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kompetensi SDM berdasarkan prinsip-prinsip *the right people in the right place at the right time*.

### Asesor

Mahkamah Agung telah mengikutsertakan sejumlah pegawai yang diproyeksikan menjadi Asesor SDM Aparatur. Pemenuhan kebutuhan Asesor SDM Aparatur dilakukan dengan mekanisme penyesuaian/inpasing dan Perpindahan Jabatan. Asesor SDM Aparatur telah mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Pada tahun 2021 Mahkamah Agung telah melantik 1 (satu) orang ke dalam jabatan fungsional asesor SDM aparatur jenjang ahli muda melalui penyesuaian/inpasing berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI 281/SEK/Kp.I/SK/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Penyesuaian/Inpasing dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur dan 5 (lima) orang ke dalam jabatan fungsional asesor SDM aparatur jenjang ahli pertama melalui perpindahan dari jabatan lain berdasarkan Keputusan Sekretaris

Mahkamah Agung Nomor 1177/SEK/Kp.I.SK/XI/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur. Dengan demikian, Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung saat ini telah memiliki 6 (enam) orang asesor.

### Kegiatan Unit Penilaian Kompetensi

Pada tahun 2021, Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung RI telah melakukan beberapa kegiatan yang dilaksanakan baik secara daring maupun secara luring (tatap muka) dengan perincian sebagai berikut.

- Penilaian Potensi dan Kompetensi untuk Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi  
Kegiatan Unit Penilaian Kompetensi merupakan salah satu tahapan dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara. Pelaksanaan kegiatan tersebut tampak pada perincian di bawah ini.

**Tabel Kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Mahkamah Agung RI Tahun 2021**

No.	Kegiatan	Tempat	Tanggal	Jumlah
1.	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Assessment Center Mahkamah Agung RI dan Satuan kerja masing-masing	5 April 2021 s.d 7 Juli 2021	59
Total				59

- Penilaian Potensi dan Kompetensi Pengisian Jabatan Struktural Eselon III pada Badan Peradilan Umum  
Kegiatan Unit Penilaian Kompetensi ini dilakukan untuk rencana promosi dalam rangka pengisian Jabatan Struktural Eselon III pada Badan Peradilan Umum. Kegiatan ini dilakukan secara mandiri dengan pendampingan dari Badan Kepegawaian Negara sebagai administrator dalam pelaksanaan Unit Penilaian Kompetensi. Pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel Kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi Jabatan Administrator Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2021**

No.	Kegiatan	Tempat	Tanggal	Jumlah
1.	Seleksi Jabatan Administrator	Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung RI	14 s.d. 15 September 2021	19
Total				19

c. Pemetaan Kompetensi

Kegiatan Unit Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan kompetensi bagi jabatan pelaksana di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Pelaksanaan kegiatan ini bekerja sama dengan lembaga penilaian kompetensi *Human Care Consulting* secara daring. Pelaksanaan kegiatan tersebut tampak pada tabel di bawah ini.

**Tabel Kegiatan Pemetaan Kompetensi Mahkamah Agung RI**

No.	Kegiatan	Tempat	Tanggal	Jumlah
1.	Pemetaan Kompetensi	Wilayah Yogyakarta	9 s.d. 12 November 2021	62
2.	Pemetaan Kompetensi	Wilayah Jawa Barat	15 s.d.18 November 2021	62
Total				124

d. Pemberian Umpan Balik Hasil Pemetaan Kompetensi

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan hasil pemetaan kompetensi, Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung melakukan kegiatan pemberian umpan balik dan penyampaian laporan kepada satuan kerja di wilayah Yogyakarta dan Jawa Barat. Kegiatan itu dilakukan sebagai tindak lanjut guna mendukung program pengembangan pegawai yang berbasis kompetensi. Pemberian umpan balik dimaksudkan agar dapat diketahui dan dimanfaatkan hasilnya oleh pimpinan satuan kerja dalam rangka promosi, mutasi, rotasi, dan pengembangan diri pegawai.

## PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN

Capaian Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan yang melatih sebanyak 13.478 peserta di bidang manajemen dan kepemimpinan telah membuahkan hasil dengan memperoleh penghargaan Rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Keberhasilan itu juga diikuti dengan perolehan akreditasi Program Pelatihan PKP, PKA, dan Latsar CPNS dan juga akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan mendapatkan penilaian predikat "A". Sementara itu, di bidang pelatihan teknis peradilan,

Pusdiklat Teknis Peradilan dipercaya oleh Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) melalui CACJ's Working Group of Judicial Education and Training (WG-JET) untuk menyelenggarakan *ASEAN Judicial Dialogue "Judicial Education and Training in the Time of Pandemic: Challenges and Lessons"*. Penghargaan dan kepercayaan yang telah diraih pada tahun 2021, tidak terlepas dari upaya inovasi dan pembaruan yang dilakukan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan melalui berbagai program pembaruan.

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI telah menggulirkan beberapa inovasi dan peningkatan sistem dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pelatihan bagi SDM Mahkamah Agung yang terus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut.

### Pengelolaan Pelatihan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat sebagai imbas dari era revolusi industri. Saat ini dunia memasuki era revolusi 4.0. Evolusi industri dunia keempat--yaitu pemanfaatan teknologi--telah menjadi

basis dalam kehidupan manusia. Segala hal tidak terbatas akibat perkembangan internet dan teknologi digital. Revolusi industri 4.0. telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, maupun dunia pendidikan atau pelatihan. Pelaksanakan, pengelolaan, dan penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas sangat dituntut agar tercipta lulusan yang berkualitas dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatannya dengan sebaik-baiknya. Dampak kemajuan TIK, seperti diuraikan di atas, mengharuskan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan, melalui Pusdiklat Teknis Peradilan dan Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, tahun 2021 mengembangkan berbagai sistem informasi pengelolaan dan penyelenggaraan pelatihan yang efektif dan efisien, yaitu sebagai berikut.

a **Teknis Pro**

Teknis Pro merupakan sistem pengelolaan pelatihan Pusdiklat Teknis Peradilan mulai dari peminatan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, sampai dengan penatausahaan surat menyurat.

b **Sibangkompas**

Sibangkompas merupakan sebuah sistem pengelolaan pelatihan di Pusdiklat Menpim Mahkamah Agung yang bertujuan meningkatkan pelayanan kediklatan dan digitalisasi administrasi.

c **Asiap**

Asiap merupakan sistem pendaftaran peserta pelatihan Pusdiklat Menpim.

d **WhatsApp Blast**

Aplikasi ini memberikan informasi terstruktur dan masif yang diinfokan ke seluruh peserta yang telah mendaftar dalam Asiap dengan fitur utama WhatsApp Perubahan Status Peserta, WhatsApp Informasi Akun Pendaftaran, WhatsApp Pemanggilan Peserta, WhatsApp Informasi Diklat, dan WhatsApp Notifikasi Sistem

e **Sertigen**

Serigen merupakan aplikasi yang digunakan untuk menerbitkan sertifikat pelatihan secara elektronik, yang disertai tanda tangan digital, dan yang diterbitkan oleh Badan Sandi Negara.

## Metode Pembelajaran pada Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak Maret 2020 membuat Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam penelitian dan pelatihan untuk pengembangan penyelenggaraan peradilan Indonesia. Dalam melakukan terobosan dan inovasi, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan memegang prinsip untuk menciptakan kualitas lulusan pelatihan terbaik dalam berbagai situasi. Situasi sekarang ini, yaitu ketika manusia harus menjaga jarak dengan mengurangi interaksi sosial, menyebabkan pelatihan yang dikembangkan lebih ditekankan pada sistem pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) dan kombinasi pembelajaran secara klasikal dan elektronik (*blended learning/hybrid learning*). Berbekal sistem manajemen pembelajaran (*learning management system*) melalui aplikasi *e-Learning* Mahkamah Agung yang telah dimiliki Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan sejak tahun 2014, telah melakukan perubahan metode pembelajaran dengan konsep *blended learning* dan *hybrid learning* dengan tahapan sebagai berikut.

1. Belajar Mandiri

Peserta pelatihan mempelajari materi pembelajaran melalui *e-Learning* Mahkamah Agung RI (*e-learning.mahkamahagung.go.id*), bahan materi dalam format bacaan (*wiki/pdf/powerpoint*), animasi/grafis, video, ataupun audio.

2. Kelas Daring (*online*)

Setelah mempelajari materi pembelajaran melalui *e-Learning*, peserta pelatihan akan menerima pembelajaran dalam bentuk penyajian materi oleh narasumber dan tanya jawab melalui aplikasi *video conference* (*zoom meeting/google meet*, dll). Selesai pembelajaran peserta wajib mengisi pertanyaan dalam bentuk kuis di *e-Learning* terkait materi yang telah diterima saat itu.

3. Pembelajaran Kolaboratif: Bedah Kasus (klasikal/elektronik/daring)

Bedah kasus atau studi kasus dilaksanakan dengan cara pembelajaran kolaboratif. Kelas akan dibagi dalam beberapa kelompok untuk mempelajari secara mendalam contoh kasus yang diberikan untuk ditelaah dan membuat penyelesaian kasus dimaksud.



Pembelajaran kolaboratif bisa dilaksanakan secara klasikal ataupun elektronik/daring tergantung kondisi perkembangan penyebaran kasus Covid-19. Dalam melaksanakan kegiatan secara daring, setiap kelompok akan tergabung dan mengakses fitur *breakout room* melalui aplikasi *video conference*.

#### 4. Evaluasi

Peserta pelatihan mengikuti evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan secara tertulis ataupun lisan. Khusus pembelajaran bidang manajemen dan kepemimpinan, dilaksanakan penyusunan aksi perubahan yang kemudian akan dipresentasikan oleh peserta pelatihan dan dinilai oleh penguji. (Penguji: Pejabat Eselon I/II di Lingkungan MA/Ketua Pengadilan Tingkat Banding/Tingkat Pertama).

Penerapan metode pembelajaran ini didukung dengan adanya berbagai sarana prasarana dibidang teknologi informasi komunikasi, seperti: studio kelas virtual, studio pembuatan materi pelatihan berbasis video, aplikasi *video conference*, ruang *e-Learning* serta aplikasi dan peralatan untuk menunjang kegiatan pembelajaran secara *hybrid* (kombinasi klasikal dan *online*)

### Kelas Inspirasi

Selain metode yang telah diuraikan pada poin dua di atas, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan juga menyelenggarakan kelas inspirasi. Kelas inspirasi dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya wawasan pengetahuan peserta pelatihan dengan belajar secara langsung dari para ahli yang kompeten di bidangnya. Kelas Inspirasi dilaksanakan khusus untuk berbagai jenis pelatihan sertifikasi yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis Peradilan dengan menghadirkan narasumber atau pembicara ahli, akademisi dalam dan luar negeri, dan bahkan pejabat tinggi negara, seperti menteri atau pimpinan lembaga tinggi negara. Tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak lima kali kelas inspirasi untuk pelatihan sertifikasi lingkungan hidup, pelatihan sertifikasi hakim niaga, dan pelatihan sertifikasi hakim yang menangani perkara korupsi serta telah mengundang pimpinan Mahkamah Agung, Menteri Lingkungan Hidup yang diwakili Deputi Kementerian Lingkungan Hidup, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan

Komisioner Komisi Yudisial, seta praktisi dan akademisi lingkungan hidup, kepailitan, dan hak kekayaan intelektual dari lembaga dalam dan luar negeri (Amerika, Norwegia, Australia, Philipina, dan ICEL).

Selain mewajibkan peserta pelatihan yang sedang mengikuti pelatihan, kelas inspirasi juga mengundang alumni peserta pelatihan sertifikasi angkatan sebelumnya yang dikemas dengan konsep pembelajaran campuran (*hybrid learning*), yaitu peserta pelatihan hadir secara tatap muka, sementara alumni pelatihan sertifikasi hadir melalui aplikasi *video conference*.

### Pengembangan Modul Pelatihan Pimpinan Pengadilan

Untuk menunjang pelatihan, pimpinan pengadilan pusdiklat memimpin mengembangkan modul pelatihan secara khusus bagi pimpinan pengadilan. Pusdiklat membuat buku Pedoman Penyelenggara Diklat pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa para calon pimpinan pengadilan hanya mengikuti pelatihan manajemen bagi pimpinan pengadilan, yaitu bagi para calon ketua pengadilan dan wakil ketua pengadilan.

Penguatan materi yang dikembangkan dalam modul pelatihan pimpinan pengadilan adalah mengedepankan (a) manajemen modern yang berintegritas pada pengelolaan pengadilan dengan sistem digital, (b) nilai-nilai integritas pimpinan pengadilan dengan pribadi yang unggul dari sisi manajemen dan kepemimpinan, serta (c) sikap dan perilaku yang lebih baik.

### SISTEM DAN JAM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU.

Penyebaran Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2019 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat Mahkamah Agung harus berinovasi dalam pelaksanaan persidangan dan waktu kerja. Mahkamah Agung menyusun kebijakan penyesuaian sistem dan jam kerja bagi hakim dan aparatur peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dengan memperhatikan kebijakan pemerintah yang berlaku tentang penyesuaian sistem kerja pegawai aparatur sipil negara selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tata Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah dengan status zona merah Covid-19, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya melaksanakan sistem dan jam kerja sebagai berikut:

- 1) menjalankan tugas kedinasan dengan mengatur jumlah hakim dan aparatur untuk bekerja di rumah (*work from home*) dan bekerja di kantor (*work form office*); dan
- 2) membagi *shift* kerja hakim dan aparatur yang melaksanakan kedinasan di kantor (*work from office*) menjadi dua, yaitu
  - a) *shift* 1: masuk pukul 07.30 waktu setempat dan pulang pukul 15.30 waktu setempat; dan
  - b) *shift* 2: masuk pukul 09.30 waktu setempat dan pulang pukul 17.30 waktu setempat.

## PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN

Reformasi birokrasi merupakan perubahan tata kelola pemerintahan yang dimulai dari perubahan pola pikir individu secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan dalam upaya menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan melayani. Untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional tersebut, diperlukan individu-individu penggerak sebagai agen perubahan yang dapat dijadikan katalisator dalam mendorong perubahan bagi individu-individu lain dalam lingkungan organisasi.

## BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung telah melakukan pemilihan Agen Perubahan pada Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1394/SEK/Kp.I/SK/XII/2021 tentang Penetapan Role Model Pada Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2021. Agen perubahan BUA adalah individu-individu yang terpilih yang menjadi pelopor perubahan sekaligus dapat menjadi contoh dan anutan (*role model*) dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan BUA.

Tabel Agen Perubahan Badan Urusan Administrasi Tahun 2021

No.	Nama/NIP.	Pangkat/GoL	Jabatan	Perubahan
1.	Fajar Andriansyah, S.T. NIP 198708192020121002	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Evaluasi Badan Urusan Administrasi	Katalisator Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan
2.	Rahayu Puji Astuti, S.Psi. NIP 199104202019032008	Penata Muda (III/a)	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	Katalisator Pembangunan Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung RI

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga menyelenggarakan pemilihan Agen Perubahan (*Agent of Change*) Tahun 2021 sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1346/DJU/SK/KP.02.1/5/2021 tentang Tim Pemilihan *Role Model* dan Agen Perubahan Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2021. Pemilihan Agen Perubahan yang dilaksanakan bertujuan untuk menentukan individu/pegawai terpilih yang menjadi pelopor dan mampu menggerakkan perubahan sekaligus berperan sebagai anutan dalam berperilaku dengan kinerja yang tinggi. Para calon agen perubahan merupakan unsur pejabat struktural/jabatan fungsional dan pelaksana yang memenuhi syarat. Agen perubahan yang terpilih diharapkan menjadi katalisator; menjadi penggerak, pemberi solusi, dan moderator; serta menjadi penghubung antara pegawai dan para pengambil keputusan dalam proses menuju perubahan.

Sekapur Sirih

Tentang  
Mahkamah AgungBAB I  
Manajemen PedanaBAB II  
Reformasi Birokrasi dan  
Ikhtis terhadap KeadilanBAB III  
Manajemen Sumber  
Baya Manusia

Tabel Agen Perubahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2021

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	Dodon Angin Wiyono, S.Kom. NIP 198708192020121002	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Seksi Pelayanan Peradilan
2.	Agustinus Evan Bangun Merdhiko, S.Kom NIP 198508182020121004	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Seksi Monitoring dan Evaluasi

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) membentuk Tim Pemilihan Agen Perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1203/DJA/KP.02.1/4/2021 Tanggal 15 April 2021 tentang Penunjukan Tim Penilai dalam Pemilihan *Role Model* untuk melakukan pemilihan figur-figur yang dapat dijadikan *role model* bagi orang lain.

Melalui tahapan dan proses yang cukup panjang dengan melibatkan seluruh pegawai yang ada pada Ditjen Badilag, ditetapkanlah figur-figur melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1952/DJA/KP.05.8/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel Agen Perubahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2021

No.	Nama/NIP.	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	Drs. Mukhlisin NIP 196408161992031002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Keuangan
2.	Rina Herlina, S.H., M.H. NIP 197606132006042003	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Mutasi I Subdit Mutasi Hakim
3.	Mohammad Taufik, S.H. NIP 198704182006041001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Tata Usaha, Subbagian Tata Usaha

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah menyelenggarakan asesmen Agen Perubahan Tahun 2021 berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 05a/DJMT/KEP/I/2021 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Hasil pemilihan agen perubahan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 22/DJMT/KEP/I/2021 tentang Penunjukkan *Agent of Change* di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini.

Tabel Daftar Nama Agen Perubahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021

No.	Nama/NIP.	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	Happy Rahmawati, S.E., M.M. NIP 198604132009122004	Penata (III/c)	Kepala Seksi Bimbingan dan Pemantauan (Monitoring) Ditbinganisminmil Ditjen Badilmitun
2.	Jefri Ardianto, S.T. NIP 197704142009041005	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Subbagian Perlengkapan Sekretariat Ditjen Badilmitun
3.	Intan Sari Hikmatul Husna Zaid, S.Kom. NIP 198701262015032001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kepala Seksi Peningkatan Mutu Panitera dan Jurusita Ditbinganisminmil Ditjen Badilmitun

## REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

### REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

Pada akhir tahun 2021 jumlah SDM di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya adalah sebanyak 30.551 orang sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.

Tabel Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia Tahun 2021

Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
		Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
Hakim Agung	50									50
Hakim Tinggi Yustisial	68									68
Hakim Yustisial	178									178
Hakim		886	3850	361	2701	31	100	46	298	8273
Panitera		699	4166	408	2903	25	77	73	313	8664
Jurusita			1804		1174			7	85	3070
SDM Non Teknis	758	704	3454	473	2399	96	296	64	270	8514
Jabatan Fungsional	472	134	375	151	521	1	9	7	64	1734
<b>Total</b>	<b>1526</b>	<b>2423</b>	<b>13649</b>	<b>1393</b>	<b>9698</b>	<b>153</b>	<b>482</b>	<b>197</b>	<b>1030</b>	<b>30551</b>

Tabel Data Pensiun SDM Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun 2021

No.	Jenis Pensiun	Jumlah
1.	Batas Usia Pensiun	1.007
2.	Pemberhentian atas Permintaan Sendiri	28
3.	Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani	6
4.	Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri	3
5.	Pemberhentian Janda/Duda	320
6.	Pemberhentian Anumerta	8
<b>Total</b>		<b>1.337</b>

Pada tahun 2021 Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen CPNS berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 723 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021. Mahkamah Agung memperoleh 3.337 formasi pegawai dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Formasi CPNS tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Analisis Perkara Peradilan	1.540
2.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	303
3.	Pengelola Perkara	1.192
4.	Pengelola Barang Milik Negara	302
Total		3.337

Untuk pelaksanaan tahapan seleksi CPNS, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan Surat Kepala BKN Nomor 5587/B-KS.04.01/SD/K/2021 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS dan Non- Guru Tahun 2021. Namun, karena kondisi Covid-19, jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS diubah sesuai dengan surat Kepala BKN Nomor 13515/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Jadwal Lanjutan Seleksi Penerimaan CPNS dan Non-Guru Tahun 2021 dan Nomor 18256/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Perubahan Jadwal Lanjutan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2021 yang telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut.

Tabel Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2021

No	Rincian Seleksi	Jumlah
1.	Pendaftar	31.660
2.	Lulus Seleksi Administratif dan Sanggahan	30.015
3.	Lulus Seleksi Kompetensi Dasar	8.299
4.	Lulus Seleksi Kompetensi Bidang dan Wawancara	3.337
5.	Rekon Integrasi Hasil SKD dan SKB	3.337



Sekretaris Mahkamah Agung RI melakukan Wawancara kepada Peserta Seleksi Kompetensi Bidang CPNS TA 2021

Dari 3.337 formasi CPNS yang disetujui, Mahkamah Agung telah berhasil memenuhi 3.337 formasi atau sebanyak 100%.

Pelaksanaan tes wawancara Kompetensi Bidang Mahkamah Agung RI untuk wilayah Jakarta di ikuti sebanyak 979 peserta. Tes wawancara tersebut meliputi wawancara kompetensi dan bahasa Inggris dengan 32 penguji yang berasal dari Hakim Agung, pejabat eselon I, hakim tinggi, dan hakim yustisial. Tes wawancara seleksi kompetensi bidang wilayah Jakarta diselenggarakan dari tanggal 7-9 Desember 2021 bertempat di gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, Bay Pass Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat.

## REKRUTMEN CALON HAKIM AD HOC

Pada tahun 2021, Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebanyak 2 (dua) tahap yaitu tahap XV yang dilaksanakan dari tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 dan tahap XVI dilaksanakan dari tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021. Pada rekrutmen Hakim Ad Hoc tahap XV, jumlah pelamar untuk Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sebanyak 267 orang dan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sebanyak 189 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XV Tahun 2021 (dalam orang)

NO.	Rincian Seleksi	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Jumlah
1.	Pendaftar	189	267	456
2.	Seleksi Administratif	147	196	343
3.	Peserta Ujian Tertulis	144	193	337
4.	Hasil Seleksi Tertulis	77	94	171
5.	Peserta Seleksi Wawancara dan Profile Assessment	70	92	161
6.	Hasil Seleksi Wawancara dan Profile Assessment	9	28	37

Sementara itu, untuk rekrutmen hakim *ad hoc* tahap XVI, jumlah pelamar untuk Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sebanyak 233 orang dan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sebanyak 184 orang yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Rekapitulasi Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XVI Tahun 2021 (dalam orang)

NO.	Perincian Seleksi	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Jumlah
1.	Jumlah Pendaftar	184	233	417
2.	Seleksi Administratif	175	197	372
3.	Peserta Ujian Tertulis	172	191	363
4.	Hasil Seleksi Tertulis	88	92	180
5.	Peserta Seleksi Wawancara dan Profile Assessment	87	92	179
6.	Hasil Seleksi Wawancara dan Profile Assessment	18	4	22

Dari rekrutmen hakim *ad hoc* Tahap XV dan Tahap XVI, peserta yang dinyatakan lulus mengikuti seluruh tahapan seleksi sebanyak 27 orang hakim *ad hoc* tipikor untuk pengadilan tingkat banding dan 32 orang hakim *ad hoc* tipikor untuk pengadilan tingkat pertama.

## REKRUTMEN JABATAN FUNGSIONAL

Pada akhir tahun 2021 jumlah SDM formasi jabatan fungsional di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya adalah sebanyak 1734 orang sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel Jumlah dan Komposisi Formasi Jabatan Fungsional Tahun 2021

Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
		Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
Analisis Kebijakan	1									1
Analisis Kepegawaian	28	25	3	35	50		7	3	20	171
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	13	22	18	19	17		1	2	3	95
Arsiparis	20	23	143	21	144				11	362
Asesor SDM Aparatur	6									6

Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
		Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
Auditor	36									36
Auditor Kepegawaian	9									9
Dokter	6									6
Peneliti	10									10
Penerjemah	8									8
Pengembang Teknologi Pembelajaran	3									3
Perancang Peraturan Perundang-undangan	1									1
Perawat	6									6
Perencana	6	2	3	1	1					13
Pranata Humas	3									3
Pranata Keuangan APBN	9	22	45	25	15				5	121
Pranata Komputer	52	35	159	46	292			2	22	608
Pranata Peradilan	232									232
Pustakawan	13	5	4	4	2	1	1		3	33
Widyaiswara	10									10
<b>Total</b>	<b>472</b>	<b>134</b>	<b>375</b>	<b>151</b>	<b>521</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>64</b>	<b>1734</b>

Pengangkatan pegawai dalam Jabatan Fungsional pada tahun 2021 dilaksanakan sebagai amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* sesuai dengan ketentuan di atas dilaksanakan sampai dengan 6 April 2021. Pegawai yang diangkat melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing* adalah sebanyak 276 seperti tampak pada tabel di bawah ini.

**Tabel Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyesuaian/*Inpassing* Tahun 2021**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Pranata Keuangan APBN	123
2.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	97
3.	Analisis Kepegawaian	39
4.	Pranata Komputer	12

No	Jabatan	Jumlah
5.	Pustakawan	3
6.	Analisis Kebijakan	1
7.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	1
<b>Total</b>		<b>276</b>

Selain itu, Mahkamah Agung melantik 3 orang pejabat fungsional perencana melalui jalur perpindahan jabatan dan sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1337/SEK/KP.00.1/6/2021 tentang Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain. Terdapat 2 jabatan fungsional yang dibuka formasinya, yaitu asesor sumber daya manusia aparatur sebanyak 11 (sebelas) formasi dan pengelola pengadaan barang/jasa sebanyak 102 (seratus dua) formasi. Sampai dengan akhir Desember 2021 telah diangkat 5 (lima) orang pejabat fungsional asesor sumber daya manusia aparatur pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi dan ditempatkan

pada Unit Kerja (*Assessment Center*) Mahkamah Agung RI, sedangkan seleksi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa diikuti oleh 25 orang pada bulan Desember 2021. Pengangkatan terhadap jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa hasil seleksi tahun 2021 akan dilaksanakan pada tahun 2022 setelah memperoleh rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**Tabel Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Perpindahan dari Jabatan lain Tahun 2021**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Perencana	3
2.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	5
<b>Total</b>		<b>8</b>

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peraturan Presiden RI Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/295/M.SM.02.03/2021 hal Pengalihan Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Negara yang memiliki unit kerja Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum dan Peradilan yang memiliki pejabat fungsional Peneliti, pada tahun 2021 dituntut untuk mengalihkan 8 dari 11 orang Pejabat Fungsional Peneliti terbaiknya ke BRIN. Sementara itu, 1 orang peneliti beralih ke Jabatan Fungsional Pranata Peradilan dan 2 orang peneliti tetap di Mahkamah Agung dengan jabatan fungsional Peneliti yang mana sesuai dengan Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-947/1/KP.03.00/12/2021 tentang Pengalihan PNS yang melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Litbangjirap) pada Kementerian/Lembaga ke BRIN sampai dengan 24 Agustus 2022.

**Tabel Pengalihan Jabatan Fungsional Peneliti Tahun 2021**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Peneliti ke BRIN	8
2.	Peneliti ke Pranata Peradilan	1
3.	Tetap di Mahkamah Agung dengan status Peneliti (sampai dengan 24 Agustus 2022)	2
<b>Total</b>		<b>11</b>

## JABATAN FUNGSIONAL PRANATA PERADILAN

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan, Mahkamah Agung secara resmi menjadi pembina bagi jabatan fungsional. Jabatan fungsional pranata peradilan secara khusus diperuntukkan PNS Mahkamah Agung yang ditempatkan di bawah Kepaniteraan Mahkamah Agung, yaitu pada Ketua Kamar Mahkamah Agung, pada Hakim Agung, pada Panitera Muda, dan pada Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung. Jabatan fungsional pranata peradilan merupakan jabatan fungsional pertama yang instansinya adalah Mahkamah Agung. Jabatan ini secara khusus membidangi teknis penyelesaian perkara pada Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Tahun 2021 Mahkamah Agung mengangkat 232 Pejabat Fungsional Pranata Peradilan melalui jalur penyesuaian/*inpassing* seperti tampak pada tabel di bawah ini.

**Tabel Pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan Tahun 2021**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pranata Peradilan Ahli Madya	42
2.	Pranata Peradilan Ahli Muda	143
3.	Pranata Peradilan Ahli Pertama	47
<b>Total</b>		<b>232</b>



Dalam hal pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan, Sekretaris Mahkamah Agung tahun 2021 menerbitkan beberapa regulasi, antara lain, yaitu Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Peradilan, Tata Cara Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Peradilan melalui Penyesuaian/*Inpassing*, dan Penetapan Kebutuhan Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional Pranata Peradilan. Mahkamah Agung juga telah mengusulkan penetapan tunjangan jabatan fungsional pranata peradilan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2022 akan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Pengangkatan jabatan fungsional pranata peradilan berdampak positif terhadap pola karier di Mahkamah Agung, khususnya di Kepaniteraan Mahkamah Agung. Jabatan pranata peradilan juga menyempurnakan pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi, dan Hak Uji Materi kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Para koordinator di lingkungan panitera muda perkara, pejabat administrator, pengawas, dan pelaksana di lingkungan Direktorat Pranata dan Tata Laksana dari ketiga Direktorat Jenderal Badan Peradilan dialihkan jabatannya ke dalam jabatan fungsional pranata peradilan.

Beberapa target regulasi yang masih ada dan yang harus ditetapkan MA pada tahun 2020, antara lain, ialah:

1. penyusunan Petunjuk Pelaksana Jabatan Fungsional Pranata Peradilan;
2. penyusunan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan;
3. penyusunan Rencana Kebutuhan Diklat (*Training Need Analysis*) Jabatan Fungsional Pranata Peradilan;
4. pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pranata Peradilan; dan
5. penyusunan Standar Kompetensi dan Kamus Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

## PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI, JURUSITA, DAN JURUSITA PENGGANTI

Tahun 2021 Mahkamah Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan ekspose pembentukan jabatan fungsional panitera pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti. Namun, Pemerintah melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/639/M.SM.02.00/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Moratorium Pengusulan Jabatan Fungsional Baru, untuk sementara waktu, melakukan penghentian sementara (*moratorium*) terhadap penetapan jabatan fungsional baru.

## PENUGASAN ANGGOTA MILITER PADA LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

Penugasan anggota Militer merupakan proses masuknya anggota militer dari Markas Besar TNI ke lingkungan Badan Peradilan Militer atau Mahkamah Agung. Penugasan itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan SDM di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Militer guna mencapai tujuan organisasi.

Tabel Penugasan Anggota Militer pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	1
2.	Hakim Utama	1
3.	Hakim Militer Tinggi	3
4.	Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi	1
5.	Kepala Bagian Pengamanan	1
6.	Panitera Pengadilan Pengadilan Militer Utama	1
7.	Panitera Pengganti Dilmil II-08 Jakarta	1
8.	Panitera Pengganti Dilmil II-09 Bandung	2
Total		11

**Tabel Anggota Militer yang Keluar dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	1
2.	Panitera Pengadilan Militer Utama	1
3.	Panitera Pengganti Dilmilti II Jakarta.	1
Total		3

## PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap aparatur sipil negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, atau bimbingan teknis. Secara tegas disebutkan bahwa setiap aparatur sipil negara berhak dan mendapatkan kesempatan yang sama mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran per tahun.

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang Pendidikan dan Pelatihan telah melaksanakan dengan maksimal. Tercatat tahun 2021 jumlah SDM Mahkamah Agung RI yang mengikuti pelatihan sebanyak 17.722 orang dengan capaian sebesar 58% dari jumlah SDM Mahkamah sebanyak 30.551 orang. Sebanyak 13.478 orang mengikuti pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan dan 4.385 orang mengikuti pelatihan di bidang teknis peradilan. Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI juga memperoleh penghargaan sebagai fasilitator pendidikan dan pelatihan aparatur terbanyak secara daring dalam 2 tahun sejak 2020--2021 dengan keluaran (*output*) sebanyak 30.371 peserta. Keberhasilan ini juga diikuti dengan dengan perolehan akreditasi program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan nilai "AAA" dan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah dengan penghargaan "Bintang Dua". Sementara itu, di

bidang Pelatihan Teknis Peradilan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dipercaya oleh CACJ-Council of ASEAN Chief Justices untuk melaksanakan pelatihan bagi hakim se-Asean.

**Tabel Capaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021**

No.	Unit Eselon II	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan	3.670	4.244	115,64
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	6.030	13.478	223,51
Total		9.700	17.722	182,70

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TEKNIS PERADILAN

Pada tahun 2021 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan telah mendidik dan melatih tenaga teknis peradilan sebanyak 4.244 orang dengan capaian kerja sebesar 115,64% dari target kerja sebanyak 3.670 orang. Berikut peincian kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang teknis peradilan.

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM (PPC) TERPADU

Pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melakukan perekrutan Calon Hakim untuk Peradilan Militer dengan target 40 orang. Berdasarkan hasil seleksi yang dinyatakan lulus untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Militer adalah sebanyak 26 orang.

**Tabel Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu Tahun 2021**

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Militer	40	26	65
Total		40	26	65

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI

Pada tahun 2021 Pelaksanaan Pelatihan Sertifikasi terdiri atas dua program, yaitu Pelatihan Sertifikasi Program Prioritas Nasional dan Pelatihan Sertifikasi Program Nonprioritas Nasional. Jumlah hakim yang telah mengikuti Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional sebanyak 970 orang atau sebesar 111,5% dari jumlah target peserta sebanyak 870 orang. Sementara itu, untuk jumlah hakim yang telah mengikuti Pelatihan Sertifikasi Nonprioritas Nasional sebanyak 413 orang atau sebesar 172,1% dari jumlah target peserta sebanyak 240 orang. Perincian jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sertifikasi diuraikan sebagai berikut.

**Tabel Program Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional Tahun 2021**

No.	Pola Didat	Target (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga	50	55	110
2.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator	500	548	109,60
3.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	160	174	108,75
4.	Pelatihan Sertifikasi SPPA Terpadu	160	193	120,62
Total		870	970	111,49

**Tabel Program Pelatihan Sertifikasi Nonprioritas Nasional Tahun 2021**

No.	Pola Didat	Target (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Perikanan	40	45	112,5
2.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	40	91	227,5
3.	Pelatihan Sertifikasi Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi	80	196	245
4.	Pelatihan Sertifikasi Ekonomi Syariah	80	81	101,25
Total		240	413	172,08



**Gambar Bimbingan Teknis Penatakelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara**

### Program Pelatihan Teknis Fungsional

Program Pelatihan Teknis Fungsional atau disebut juga Pelatihan Teknis Yudisial diperuntukan seluruh tenaga teknis peradilan, yaitu hakim, panitera, panitera muda, panitera pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti. Perincian jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis yudisial diuraikan sebagai berikut.

**Tabel Program Pelatihan Teknis Fungsional Tahun 2021**

No.	Pola Didat	Peserta (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Bukti Elektronik	40	37	92,50
2.	Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan terhadap Keadilan	40	44	110
3.	Pelatihan Teknis Yudisial Narkotika	40	58	145
4.	Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana	80	64	80
5.	Pelatihan Teknis Yudisial Hak Kekayaan Intelektual	40	43	107,50
6.	Pelatihan Teknis Yudisial Akad Syariah	80	98	122,50
7.	Pelatihan Teknis Yudisial Jinayat	40	44	110
8.	Pelatihan Teknis Yudisial Penyetaraan Ekonomi Syariah	80	78	97,50
9.	Pelatihan Teknis Yudisial Terorisme	40	48	120

No.	Pola Didik	Peserta (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
10.	Pelatihan Teknis Yudisial Blasphemy	40	50	125
11.	Pelatihan Teknis Yudisial Humaniter	40	40	100
12.	Pelatihan Teknis Yudisial Tata Usaha Militer	40	39	97,50
13.	Pelatihan Teknis Yudisial Perizinan Pasca UU Cipta Kerja	40	45	112,50
14.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja	40	38	95
15.	Pelatihan Teknis Yudisial Keputusan dan Bukti Elektronik	40	37	92,50
16.	Pelatihan Teknis Yudisial Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang	40	38	92
17.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tindakan Pemerintah	40	32	80
18.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Barang dan Jasa	40	33	82,50
19.	Pelatihan Teknis Yudisial Kepailitan	40	45	112,50
20.	Pelatihan Teknis Yudisial Penyetaraan SPPA	40	32	80
<b>Total</b>		<b>840</b>	<b>943</b>	<b>112,26</b>

**Tabel Program Pelatihan Teknis Fungsional Panitera dan  
Jurusita**

No.	Pola Didik	Peserta (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti	800	813	101,62
2.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Berkelanjutan	200	52	26
3.	Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita/ Jurusita Pengganti	240	314	130,83
<b>Total</b>		<b>1.240</b>	<b>1.179</b>	<b>95,08</b>

## KERJA SAMA PELATIHAN

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga pemerintah ataupun nonpemerintah, dalam dan luar negeri di bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia Mahkamah Agung. Sebanyak 64 orang telah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya dengan cara pembelajaran menggunakan *e-Learning*, yaitu sebagai berikut.

- a) Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan HAM RI

**Tabel Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum  
dan HAM RI Tahun 2021**

No.	Kerja Sama	Peserta
1.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LVI Jakarta 3 s.d. 25 februari 2021	4
2.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LVII Jakarta 3 s.d. 25 Maret 2021	2
3.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LVIII Jakarta 31 Maret s.d. 22 April	5
4.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LIX Jakarta 3 s.d. 23 Juni 2021	5
5.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LX Jakarta 4 s.d. 27 Agustus 2021	5
6.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LXI Jakarta 1 s.d. 22 September 2021	5
7.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LXII Jakarta 29 September s.d. 21 Oktober 2021	4
8.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LXIII Jakarta 27 Oktober s.d. 17 November 2021	5
9.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LXIV Jakarta 17 November s.d. 8 Desember 2021	5
<b>Total</b>		<b>41</b>

## b) Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung RI

Tabel Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung RI Tahun 2021

No.	Kerja Sama	Peserta
1.	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan I 20 April s.d. 7 Mei 2021	3
2.	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan II 20 April s.d. 7 Mei 2021	3
3.	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan III 20 April s.d. 7 Mei 2021	3
4.	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan IV 20 April s.d. 7 Mei 2021	3
<b>Total</b>		<b>12</b>

## c) Mahkamah Agung dengan Kepolisian RI

Tabel Mahkamah Agung dengan Kepolisian RI Tahun 2021

No.	Kerja Sama	Peserta
1.	Pelatihan SPPA Terpadu 23 Agustus s.d. 4 September Hotel Cosmo Amarossa, Jakarta	3

## d) Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tabel Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2021

No.	Kerja Sama	Peserta
1.	Temu Wicara Virtual I 3 s.d. 10 November 2021	72
2.	Temu Wicara Virtual II 17 s.d. 24 November 2021	68
<b>Total</b>		<b>140</b>

## e) Mahkamah Agung dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tabel Mahkamah Agung dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2021

No.	Kerja Sama	Peserta
1.	Diskusi kelompok terpumpun (DKT) atau focus group discussion (FGD) tentang "Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sektor Jasa Keuangan" di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, 18 s.d. 21 Maret 2021	12
2.	Diskusi kelompok terpumpun (DKT) atau focus group discussion (FGD) seri II tentang "Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Bidang Pasar Modal" di Hotel Padma, Ubud, Bali, 28 s.d. 31 Oktober 2021	10
<b>Total</b>		<b>22</b>

## f) Mahkamah Agung dengan ECEL dan LEIP

Tabel Mahkamah Agung dengan LEIP Tahun 2021

No.	Kerja Sama	Peserta
1.	Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup Angkatan XII, 25 Januari s.d. 5 Maret 2021 Tahap 1: 25 Januari s.d. 5 Februari 2021 Tahap 2: 8 s.d. 24 Februari 2021 Tahap 3: 26 Februari s.d. 5 Maret 2021 Daring (Zoom Meeting)	91
2.	Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup Angkatan XV, 1 November s.d. 1 Desember 2021 Tahap 1: 1 s.d. 11 November 2021 Tahap 2: 15 s.d. 24 November 2021 Tahap 3: 25 November s.d. 1 Desember 2021 Luring, Hotel Mercure, Jakarta	80
<b>Total</b>		<b>171</b>

g) Mahkamah Agung dengan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*

Tabel Mahkamah Agung dengan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* Tahun 2021

No.	Kerja Sama	Peserta
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Kejahatan Kemaritiman, 1 s.d. 9 Februari 2021 Daring (Zoom Meeting)	90
2.	Pelatihan Peradilan Semu (Mock Trials) Terkait Kasus Kejahatan Maritim, 21 s.d. 25 November 2021 Luring, Hotel Swiss Bell-In, Bogor	3
Total		93

h) Mahkamah Agung dengan *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*

Tabel Mahkamah Agung dengan *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* Tahun 2021

No.	Kerja Sama	Peserta
1.	Pelatihan Singkat Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan terkait Kapita Selekta Permasalahan Perkara Lingkungan Hidup Tata Usaha Negara, 17 s.d. 26 Maret 2021, Daring (Zoom Meeting)	35

i) Mahkamah Agung dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia

Tabel Mahkamah Agung dengan *PUSHAM UII* Tahun 2021

No.	Kerja Sama	Peserta
1.	<i>Training Of Trainer (TOT) "Peradilan yang Fair (Fair Trial) bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum"</i> , 27 s.d. 29 Mei 2021, Hotel Satoria, Yogyakarta	11
2.	<i>Training Piloting Hakim tentang Peradilan yang Adil (Fair Trial) bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum</i>  Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara Wilayah Hukum Jawa Tengah dan Yogyakarta, 19 s.d. 23 Oktober 2021, Hotel Alana, Yogyakarta	20
Total		31

j) Mahkamah Agung dengan *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*

Tabel Mahkamah Agung dengan *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)* Tahun 2021

No.	Kerja Sama	Peserta
1.	Sosialisasi Perma No. 3/2017 dan Perma No. 5/2019 Tahap 1: 22 s.d. 25 November 2021 Tahap 2: 29 November s.d. 2 Desember 2021	729

k) Mahkamah Agung dengan *International Organization for Migration (IOM)*

Tabel Mahkamah Agung dengan *International Organization for Migration (IOM)* Tahun 2021

No.	Kerja Sama	Peserta
1.	Pelatihan untuk Pelatih Tindak Pidana Perdagangan Orang, 13 s.d. 17 Desember 2021, Hotel Novotel, Tangerang, Banten	22

## BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya juga melakukan pembinaan SDM melalui program bimbingan teknis yang dilakukan secara rutin dalam setiap tahunnya. Kegiatan bimbingan teknis ini dapat dilakukan oleh setiap tingkat eselon I Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

## BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Kepegawaian Mahkamah Agung RI berlangsung secara tatap muka (luring) yang diikuti oleh peserta dari seluruh pengadilan tingkat banding dan secara daring yang diikuti oleh satuan kerja di seluruh Indonesia. Materi bimbingan teknis kepegawaian ini meliputi pengembangan kompetensi, penerapan SKP sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2021, penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021, penerapan PP Nomor 30 Tahun 2021, kepangkatan PNS, dan jabatan fungsional. Pelaksanaan bimbingan teknis kepegawaian tersebut mengundang narasumber dari internal biro kepegawaian dan eksternal dari Badan Kepegawaian Negara yang diselenggarakan dari tanggal 22 s.d. 23 Desember 2021 bertempat di Hotel Aston Grogol, Jakarta.

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di Lingkungan Badan Peradilan Umum, sebagai berikut.

**Tabel Bimbingan Teknis di Lingkungan Badan Peradilan Umum Tahun 2021**

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	FGD Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa berdasarkan Perspektif Hakim TUN secara daring (online), 26 dan 28 Januari 2021 di Jakarta	50
2.	Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Jurusita/Jurusita Pengganti secara daring (online) di Lingkungan Peradilan Umum, 11 Februari dan 16 Februari 2021 di Jakarta	88
3.	FGD Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum, 15 s.d. 17 Juni 2021 di Samarinda	40
4.	Bimtek Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual, 23 s.d. 25 Maret 2021 di Semarang	44
5.	Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Panitera Pengganti di Lingkungan Peradilan Umum, 6 s.d. 8 Agustus 2021 di Mataram	40
6.	Bimtek Antar penegak Hukum dalam Upaya Kinerja Peradilan Pengadilan Negeri, 31 Agustus s.d. 2 September 2021 di Berastagi (Sumatera Utara)	55
7.	Bimtek Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> )	316
8.	Rasionalisasi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	35
9.	Bimtek Pedoman Penyelesaian Perkara HKI	44
<b>Total</b>		<b>668</b>

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

1) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI juga menyelenggarakan kegiatan peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan serta sikap dan perilaku pegawai (*capacity building*) di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3125/DJA/KP.03/SK/11/2021 tanggal

9 November 2021 tentang Kegiatan Pembinaan Pegawai/Personal *Capacity Building* Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2021. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan:

- membangun karakter setiap individu pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
- membangun pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara yang bersifat melayani;
- memupuk kebersamaan dalam rangka meningkatkan performa individu setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan; dan
- membantu mempercepat terwujudnya capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Kegiatan ini diikuti oleh 146 orang yang terdiri atas pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, pelaksana, dan pegawai honorer, dimulai dari tanggal 24 s.d. 26 November 2021, dan bekerja sama dengan CV Mutiara Wisata di Spark Forest Hotel Sukabumi.

### 2) Eksaminasi secara Elektronik (E-Eksaminasi)

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, pimpinan pengadilan mempunyai kewajiban melaksanakan eksaminasi terhadap putusan bakim bawahannya sebagai sarana pembinaan dalam rangka memperbaiki kinerja hakim dan peningkatan kemampuan teoretis mengenai hukum materiel ataupun hukum acara serta menilai kemampuan hakim dalam menerapkan hukum tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menegakkan keadilan.

Pelaksanaan Eksaminasi secara Elektronik didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 246/DJA/HM.00.2.3/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Eksaminasi Hakim Peradilan Agama secara Elektronik Melalui Aplikasi E-Eksaminasi Tahun 2020. Pelaksanaan Eksaminasi secara Elektronik (E-Eksaminasi) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis yudisial, integritas pribadi, kredibilitas, serta profesionalitas para hakim dan tenaga teknis; pemetaan tenaga teknis sebagai data kuantitatif untuk pembinaan lebih lanjut; dan

bahan promosi dan mutasi, yang nilai hasil eksaminasi menjadi salah satu bahan pengambilan kebijakan dalam promosi dan mutasi tenaga teknis peradilan agama. Pelaksanaan eksaminasi secara elektronik juga merupakan program penguatan area IV RB dan area II pembangunan ZI, yaitu panataan tata laksana. Sejak Tahap I Tahun 2020 hingga Tahap II Tahun 2021 telah dilaksanakan eksaminasi secara elektronik terhadap 1913 dari 2719 hakim pengadilan tingkat pertama dengan eksaminator sebanyak 168 dari 383 hakim tinggi. Ada 5 aspek yang menjadi objek penilaian dalam sistem eksaminasi elektronik ini, yaitu penerapan hukum materiel, Penerapan hukum formil, mutasi dan pemberkasan, penerapan asas sederhana: cepat dan biaya ringan, serta manajemen perkara.

- 3) Kajian Fatwa DSN-MUI Hasil MOU antara Ditjen Badilag Dengan DSN-MUI  
 Kajian ini diselenggarakan oleh DSN Institute setiap hari Selasa Pukul 20.00--21.30 WIB secara daring melalui *zoom meeting*. Kajian Fatwa DSN-MUI dan Implementasinya di LKS dan LBS (Kelas Khusus Praktisi Hukum) bertujuan untuk meningkatkan

pengetahuan dan pemahaman fikih muamalah maliyah; memberikan pemahaman yang mendalam terkait fatwa-fatwa DSN-MUI dan implementasinya di lembaga keuangan dan bisnis syariah; dan sebagai forum yang dapat dimanfaatkan untuk membahas dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang muncul dalam penerapan Fatwa DSN-MUI pada lembaga keuangan dan bisnis syariah di masyarakat. Hakim yang mengikuti kajian fatwa DSN-MUI dan impementasinya di lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah (Kelas Khusus Praktisi Hukum) berjumlah 87 orang.

- 4) Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Tahun 2021  
 selain pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, Ditjen Badan Peradilan Agama juga secara rutin menyelenggarakan bimbingan teknis secara daring yang diikuti oleh tenaga teknis peradilan agama di seluruh satuan kerja, yaitu sebagai berikut.

**Tabel Bimtek dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Tahun 2021**

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah
1.	Workshop Eksplorasi Pelanggaran KEPPH dalam Hukum Acara ( <i>online</i> )	Komisi Yudisial	16--19 Maret 2021	22
2.	Bimtek Daring "Permasalahan Hukum Wakaf dan Wasiat"	Ditjen Badilag dan Y.M. Dr. H. Abd. Manaf, M.H.	19 Maret 2021	100
3.	Bimtek ToT Hukum Acara	Ditjen Badilag	29 Maret--1 April 2021	38
4.	Workshop Eksplorasi Pelanggaran KEPPH dalam Hukum Acara ( <i>online</i> )	Komisi Yudisial	6--9 April 2021	20
5.	Bimtek Daring "Permasalahan Permohonan Dispensasi Kawin dan Hadonah Tahap I"	Ditjen Badilag dan YM Drs. H. Busra, S.H., M.H.	16 April 2021	100
6.	Pelatihan Implementasi KEPPH ( <i>online</i> )	Komisi Yudisial	2--4 Juni 2021	12
7.	Workshop Eksplorasi Pelanggaran KEPPH dalam Hukum Acara ( <i>tatap muka</i> )	Komisi Yudisial	8--11 Juni 2021	20
8.	Bimtek Daring "Permasalahan Permasalahan Sita dan Eksekusi" (Drs. H. Mohammad Yamin Awie, SH. MH.)	Ditjen Badilag	25 Agustus 2021	1.354
9.	Bimtek Daring "Berbagai Permasalahan Eksekusi di Pengadilan" (Y.M. Dr. Amran Suadi, S.H., M.JHum.)	Ditjen Badilag	10 September 2021	984



No.	Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah
1.	Workshop Eksplorasi Pelanggaran KEPPH dalam Hukum Acara (online)	Komisi Yudisial	16--19 Maret 2021	22
2.	Bimtek Daring "Permasalahan Hukum Wakaf dan Wasiat"	Ditjen Badilag dan Y.M. Dr. H. Abd. Manaf, M.H.	19 Maret 2021	100
3.	Bimtek ToT Hukum Acara	Ditjen Badilag	29 Maret--1 April 2021	38
4.	Workshop Eksplorasi Pelanggaran KEPPH dalam Hukum Acara (online)	Komisi Yudisial	6--9 April 2021	20
5.	Bimtek Daring "Permasalahan Permohonan Dispensasi Kawin dan Hadonah Tahap I"	Ditjen Badilag dan YM Drs. H. Busra, S.H., M.H.	16 April 2021	100
10	Bimtek Daring "Permasalahan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama" (1. Y.M. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., ATR/BPN, POLRI dan KPKNL Jakarta I)	Ditjen Badilag	29 November 2021	766
11.	Bimtek Daring "Bedah Berkas Putusan Ekonomi Syariah" (Y.M. Dr. Edi Riadi, S.H., M.H, Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Hum., Y.M. Dr. Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Mohammad Akhbar Dewani, S.H., M.H.)	Ditjen Badilag	23 Desember 2021	1.267
Total				4.683

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Berdasarkan Pasal 218 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, salah satu tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ialah untuk melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis (bimtek), serta penyiapan pengusulan pengembangan dan pembinaan tenaga teknis Peradilan Tata Usaha Negara. Pengembangan kompetensi yang sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, penataran, dan/atau bimbingan teknis.

Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan 5 bimtek bagi Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan secara *blended learning*, yaitu sebagai berikut.

Tabel Kegiatan Bimbingan Teknis SDM Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah
1.	Bimtek Persidangan secara Elektronik bagi Hakim Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	03 s.d. 05 Maret 2021	48
2.	Bimtek Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	24 s.d. 26 Maret 2021	44
3.	Pokja Pengkajian Sengketa Pertanahan, Pokja Pengkajian Sengketa Lingkungan Hidup, Pokja Pengkajian Sengketa Fiktif Positif, dan Pokja Pengkajian Sengketa Perizinan di Peradilan Tata Usaha Negara Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	07 s.d. 09 April 2021	29
4.	Bimtek Pendalaman Pemeriksaan Sengketa Pertanahan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara	08 s.d. 10 September 2021	52

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah
5.	Bimtek Pemeriksaan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara	27 s.d. 29 Oktober 2021	40
6.	Bimtek Upaya Administratif dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif	3 s.d. 5 November 2021	36
Total			249

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah mengadakan Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan yang dilaksanakan dengan metode *blended learning* antara lain sebagai berikut.

**Tabel Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan	Jumlah
1.	Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	21 s.d. 23 Juli 2021	16
2.	Kelompok Kerja Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	29 September s.d. 1 Oktober 2021	11
3.	Peningkatan Pelayanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	30 Agustus s.d. 6 Oktober 2021	14
4.	Kelompok Kerja Revisi Buku II di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	6 s.d. 8 Oktober 2021	11
5.	Penatakelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	21 s.d. 23 Oktober 2021	18
6.	Bimbingan Teknis Pelayanan Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	27 s.d. 29 Oktober 2021	102
7.	Bimbingan Teknis Penatakelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	16 s.d. 17 Desember 2021	45
Total			217

Pembentukan kelompok kerja (pokja) dan kegiatan bimtek ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka mengembangkan kompetensi para Hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Demi percepatan perwujudan visi dan misi Mahkamah Agung, pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini mengoptimalkan

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan peningkatan kinerja, khususnya di bidang teknis yudisial Hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan bekal pengetahuan dan kompetensi baru yang didapatkan pada bimtek dan pokja ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan kerja, kinerja, serta menunjang pengembangan karier Hakim Peradilan Tata Usaha Negara.

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM DI BIDANG MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

Pada tahun 2021 Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Manajemen dan Kepemimpinan telah mendidik dan melatih tenaga administrasi peradilan dan tenaga yudisial di bidang manajemen dan kepemimpinan sebanyak 13.478 orang dengan capaian kinerja sebesar 223,51% dari target kerja sebanyak 6.030 orang. Berikut ini merupakan perincian kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan.

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (LATSAR CPNS)

Pada tahun 2021 Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan tidak melakukan penganggaran alokasi pada latsar CPNS. Hal itu disebabkan adanya peraturan pemerintah yang belum dapat dipastikan dalam melakukan perekrutan CPNS pada tahun 2020. Sejalan dengan waktu, perekrutan dilakukan pada tahun 2021 dan Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan melaksanakan latsar CPNS dengan melakukan optimalisasi pagu anggaran dengan perincian kegiatan sebagai berikut.

Tabel Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021

No.	Pelatihan	Jumlah
1.	Diklat Latsar Golongan III Gelombang I Daring	480
2.	Diklat Latsar Golongan II Gelombang I Daring	479
Total		959

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan telah melaksanakan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II bagi para pejabat yang akan menduduki jabatan eselon II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) bagi pejabat yang akan menduduki jabatan eselon III, dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP) bagi

pejabat yang akan menduduki jabatan eselon IV. Seluruh kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan dibawah pembinaan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan merencanakan pelaksanaan PKN tingkat II sebanyak 10 orang, tetapi tidak dapat terlaksana karena yang diajukan kepada LAN belum memenuhi kualifikasi. Berikut ini adalah perincian Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tahun 2021.

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2021

No.	Pelatihan	Jumlah
1.	PKA	238
2.	PKP	806
Total		1.044

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI UMUM

Pada tahun 2021, Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan melaksanakan kegiatan pelatihan dengan perincian pelatihan tersebut tampak sebagai berikut.

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum

No.	Pelatihan	Jumlah
1.	Mengelola Stres di Lembaga Peradilan	93
2.	Membangun Kerja Sama Tim Peradilan	105
3.	Menjadi Pemimpin Peradilan yang Lincah	44
4.	Mengelola Arsip Digital Pengadilan	155
5.	Design Thinking untuk Inovasi Peradilan	91
6.	Coaching untuk Peradilan	196
7.	Pola Kerja Produktif	98
8.	Berpikir Kreatif dan Inovatif	157
9.	Coaching untuk Milenial	66
10.	Pola Pikir Pertumbuhan	63
11.	Beradaptasi dengan New Normal	37
12.	Memimpin Tim Virtual	34
13.	Mengembangkan Budaya Virtual	44
14.	Optimalisasi Kolaborasi Lintas Generasi	48

No.	Pelatihan	Jumlah
15.	Big Data, Artificial Intelligence di Pengadilan	35
16.	Pemonitoran Aksi Perubahan	424
17.	Literasi Digital Pengadilan	173
18.	Membangun Pola Pikir Berkelanjutan dan Kecepatan Pembelajaran	171
19.	Pemecahan Masalah Praktis	158
20.	Executive Summary	680
21.	Kegiatan Humas di Pengadilan	437
22.	Publikasi Humas di Pengadilan	396
23.	LIA Preparation Course for TOEFL	39
24.	General English for Adults 3 (Pre-Intermediate)	1.285
25.	Diklat Pelayanan Prima	66
26.	Diklat Public Speaking and Effective Communication Program	377
27.	Efektivitas Pribadi	182
28.	Mengelola Orang Lain	82
29.	Ilmu Jurnalistik	295
30.	Argumentasi Gagasan di Media Massa	291
31.	Story Telling	49
32.	Basic 3D Mapping	91
33.	Basic Booklet Design with Adobe InDesign	405
34.	Basic Image Editing with Adobe Photoshop	216
35.	Basic Infographic Design with Adobe Illustrator	301
36.	Basic Modelling with 3D Max	108
37.	Basic Motion Graphic with Adobe After Effect	221
38.	Basic User Experience Design	214
39.	Basic User Interface Design	267
40.	Basic Video Editing	271
41.	Basic Video Production	281
42.	Teknik Pengelolaan Arsip Dinamis	180
43.	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	454
44.	Manajemen Laporan Kinerja	741
45.	Manajemen ASN	229
46.	Pelatihan Online Teknik Penyusunan IKU dan Renstra	94
<b>Total</b>		<b>10.444</b>

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional

No.	Pelatihan	Jumlah
1.	PPK dan Penyebaran PPK	236
2.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN	578
3.	PPSPM dan Penyebaran PPSPM	217
<b>Total</b>		<b>1.031</b>

## PENGEMBANGAN HAKIM MILITER DAN ANGGOTA MILITER DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

Selain mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, anggota militer diharuskan mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) secara berjenjang guna menunjang profesionalisme dan pembinaan karier yang dipersyaratkan oleh Mabes TNI. Pendidikan yang dilaksanakan antara lain adalah sebagai berikut.

Tabel Pendidikan Pengembangan Umum Anggota Militer di Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Staf Komando Angkatan Udara (Sesko AU)	2
2.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Polri	1
3.	Sekolah Komandan Kesatuan TNI AU	1
4.	Pendidikan Pembentukan Perwira TNI AD	2
5.	Pendidikan Kursus Bintara Manajemen Kejuruan	1
<b>Total</b>		<b>7</b>

Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis Hakim dan Panitera di lingkungan Peradilan Militer, pada tahun 2021 telah dilaksanakan bimbingan teknis kepada SDM teknis dan non teknis, dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Bimbingan Teknis Hakim dan Kepaniteraan  
Peradilan Militer Tahun 2021**

No.	Nama Pelatihan	Jumlah
1.	Bimtek Hakim	132
2.	Bimtek Panitera	40
3.	Bimbingan Teknis Asesor di Lingkungan Peradilan Militer TA 2021	30
4.	Bimbingan Teknis Pelayanan Disabilitas di Lingkungan Peradilan Militer TA 2021	40
5.	Bimtek Hakim Militer dengan tema Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2021, 24–26 Maret 2021	40
6.	Bimtek Hakim Militer Tahun Anggaran 2021 dengan tema Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di Lingkungan Prajurit TNI Tanggal 9 s.d 11 Juni 2021 di Hotel Teraskita Cawang	40
7.	Bimtek Hakim III Tahun Anggaran 2021 dengan tema Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Illegal Logging di Lingkungan Peradilan Militer, 8–10 September 2021 di Park Hotel, Cawang, Jakarta	42
8.	Bimtek Panitera Pengadilan Militer Tahun Anggaran 2021 dengan tema Penyelesaian Permohonan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer ke Mahkamah Agung RI di Lingkungan Peradilan Militer, 06--08 Oktober 2021 di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta	40
9.	Bimtek Asesor di Lingkungan Peradilan Militer, 22–24 Februari 2021 di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta	30
10.	Bimtek Pelayanan Disabilitas di Lingkungan Peradilan Militer, 7--9 April 2021 di Hotel Aryaduta Menteng	40
Total		474

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 705/SET/KH.01.01/09/2021 tanggal 30 September 2021 telah dilaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim mulai tanggal 12 s.d. 15 Oktober 2021 di Surabaya.

**Tabel Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim di  
Peradilan Militer Tahun 2021**

No.	Pelatihan	Jumlah
1.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim	49

## TANDA KEHORMATAN DAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Pada tahun 2021 Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama kepada mantan Hakim Agung, Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M. sebagai penghormatan tertinggi karena telah berjasa luar biasa dalam bentuk pengabdian dan pengorbanan di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang besar manfaatnya dan diakui jasanya secara luas pada tingkat nasional dan internasional guna kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/TK/Tahun 2021 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera sebagai berikut.

**Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan  
Tahun 2021**

No.	Nama	Penghargaan	Keterangan
1.	Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.	Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama	Keputusan Presiden RI Nomor : 78/TK/tahun 2021 Tanggal : 12 Agustus 2021 Tentang : Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera



**Perwakilan Penerima Tanda Penghargaan Satyalancana Karya Satya dan Satya Karya Tahun 2021**

Presiden Joko Widodo juga menganugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 3.684 PNS Mahkamah Agung sebagai penghargaan yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta telah bekerja terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 71/TK/Tahun 2021, tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya. Penghargaan ini bertujuan sebagai pendorong bagi PNS untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja sehingga dapat dijadikan teladan bagi PNS lain, yaitu sebagai berikut.

**Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2021**

No.	Penghargaan	Jumlah
1.	Satyalancana Karya Satya XXX	1.153
2.	Satyalancana Karya Satya XX	622
3.	Satyalancana Karya Satya X	1.909
Total		3.684

Selain itu, Ketua Mahkamah Agung memberikan tanda penghargaan kepada 1.655 pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya karena telah berbakti selama 8 dan 16 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan, dan pengabdian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 76/KMA/SK/IV/2021 tanggal 26 April 2021 dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Karya Satya Tahun 2021**

No.	Penghargaan	Jumlah
1.	Karya Satya Sewindu	576
2.	Karya Satya Dwiwindu	1.079
Total		1.655

Pelaksanaan penyematan tanda penghargaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2021 kepada perwakilan dari setiap penerima penganugerahan yang dilaksanakan.

## PROMOSI DAN MUTASI

Pola promosi dan mutasi untuk SDM teknis di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan, sedangkan promosi SDM nonteknis dilakukan berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/SEK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pola Mutasi dan Promosi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pelaksanaan promosi dan mutasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja SDM di organisasi, menambah pengetahuan, mewujudkan keseimbangan antara jumlah SDM dan beban kerja, serta melaksanakan *reward* dan *punishment*. Promosi dan mutasi didasarkan atas dasar kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan dengan perincian sebagai berikut.

## BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

Badan Urusan Administrasi (BUA) telah melaksanakan promosi dan mutasi SDM nonteknis di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebanyak 1.039 orang dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Promosi dan Mutasi SDM Nonteknis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021**

No.	Jabatan	Unit Kerja	Jumlah
1.	Eselon I	Mahkamah Agung dan Eselon I Lainnya	1
2.	Eselon II	Mahkamah Agung	8
3.	Eselon III	Mahkamah Agung	49
4.	Eselon IV	Mahkamah Agung	71

No.	Jabatan	Unit Kerja	Jumlah
5.	Eselon II	Peradilan di bawah MA	28
6.	Eselon III	Peradilan di bawah MA	106
7.	Eselon IV	Peradilan di bawah MA	467
8.	Pelaksana	Peradilan di bawah MA	179
9.	Mutasi Antarinstansi	ke Mahkamah Agung	130
Total			1.039

Selain itu, Badan Urusan Administrasi (BUA) telah melaksanakan kenaikan pangkat otomatis melalui surat keputusan pejabat berwenang periode April dan Oktober 2021 sejumlah 2.457 pegawai dengan perincian sebagai berikut

**Tabel Kenaikan Pangkat Otomatis SDM Nonteknis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021**

No.	Pangkat	Jumlah
1.	I/c	5
2.	I/d	3
3.	II/a	4
4.	II/b	26
5.	II/c	124
6.	II/d	105
7.	III/a	57
8.	III/b	412
9.	III/c	549
10.	III/d	884
11.	IV/a	206
12.	IV/b	82
Total		2.457

Badan Urusan Administrasi (BUA) juga telah melaksanakan kenaikan pangkat nonotomatis melalui surat keputusan pejabat berwenang periode April dan Oktober 2021 sejumlah 221 pegawai dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Kenaikan Pangkat Nonotomatis SDM Nonteknis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021**

No.	Pangkat	Jumlah
1.	III/a	1
2.	III/b	3
3.	III/c	4
4.	III/d	19
5.	IV/a	98
6.	IV/b	75
7.	IV/c	18
8.	IV/d	3
Total		221

Badan Urusan Administrasi (BUA) telah melaksanakan kegiatan pelantikan dan penyempahan pada tahun 2021 sejumlah 187 orang dengan perincian sebagai berikut.

No.	Pelantikan	Tanggal	Jumlah
1.	Pejabat Struktural (Eselon II), Hakim Tinggi Pengawas dan Jabatan Fungsional Tertentu	8 Januari 2021	19
2.	Ketua Pengadilan Tingkat Banding	13 Januari 2021	5
3.	Panitera Pengganti	28 Januari 2021	23
4.	Panitera Mahkamah Agung RI	03 Februari 2021	1
5.	Pejabat Struktural (Eselon III, IV) dan Jabatan Fungsional Tertentu	04 Februari 2021	53
6.	Ketua Pengadilan Tingkat Banding	08 Februari 2021	5
7.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Kasasi	16 April 2021	3
8.	Ketua Pengadilan Pajak	07 Mei 2021	1
9.	Ketua Muda Pengawasan	07 Mei 2021	1
10.	Ketua Pengadilan Tingkat Banding	02 Juli 2021	12

No.	Pelantikan	Tanggal	Jumlah
11.	Pejabat Struktural (Eselon II, III) dan Jabatan Fungsional Tertentu	30 Agustus 2021	26
12.	Ketua Pengadilan Tingkat Banding	22 September 2021	17
13.	Pejabat Struktural (Eselon III)	27 September 2021	1
14.	Panitera Muda	08 Oktober 2021	1
15.	Hakim Agung	19 Oktober 2021	7
16.	Panitera Muda	19 Oktober 2021	3
17.	Badan Pemeriksa Keuangan	03 November 2021	1
18.	Hakim Tinggi Pengawas	11 November 2021	7
19.	Ketua Pengadilan Tingkat Banding	30 Desember 2021	1
Total			187

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI melakukan kegiatan promosi dan mutasi (TPM) SDM nonteknis dalam lingkup unit eselon I ataupun dengan unit eselon I lainnya di lingkungan Mahkamah Agung. Perincian jumlah pegawai dan/atau pejabat struktural yang mendapatkan promosi dan mutasi adalah sebagai berikut.

Tabel Mutasi dan Promosi SDM Nonteknis Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI Tahun 2021

No.	Jabatan	Promosi/Mutasi Keluar	Mutasi/Rotasi Lingkup Ditjen
1.	Eselon III	5	5
2.	Eselon IV	15	15
3.	Pelaksana	5	5
Total		25	25

Tabel Pensiun SDM Nonteknis Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	3
3.	Pelaksana	4
Total		9

Terdapat dua mekanisme kenaikan pangkat di lingkungan Ditjen Badilum, yaitu kenaikan pangkat otomatis (KPO) dan kenaikan pangkat pilihan (non-KPO). Sepanjang tahun 2021 sebanyak 19 (sembilan belas) pegawai telah diproses melalui mekanisme KPO dan sebanyak 19 (sembilan belas) pegawai telah diproses melalui mekanisme non-KPO.

Tabel Kenaikan Pangkat SDM Nonteknis Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Tahun 2021

NO.	KEPANGKATAN	JUMLAH
1.	Kenaikan Pangkat Otomatis	4
2.	Kenaikan Pangkat Pilihan	15
Total		19

Ditjen Badilum juga telah melaksanakan promosi dan mutasi bagi Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kali Rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) dan 1 (satu) kali melalui Rapat Pimpinan (Rapim) dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Umum Tahun 2021

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan	Jumlah
1.	Rapat Pimpinan	3 Februari 2021	Hakim Tk. Banding	4
2.	Rapat TPM ke-1	27 April 2021	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding Hakim Ad Hoc	460 82 69
3.	Rapat TPM ke 2	8 September 2021	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding	396 50
4.	Rapat TPM ke-3	27 Desember 2021	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding Hakim Ad Hoc	400 62 73
Total				1.596



Untuk Kepaniteraan Peradilan Umum, Ditjen Badilum telah melaksanakan promosi dan mutasi melalui 4 kali Rapat Promosi dan Mutasi (TPM) sebanyak 1.244 orang dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Umum Tahun 2020**

No.	Jabatan	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Jumlah
1.	Panitera	14	186	200
2.	Panitera Muda	26	421	447
3.	Mutasi Panitera Pengganti	103	199	302
4.	Pengangkatan Panitera Pengganti	0	170	170
5.	Mutasi Jurusita	0	25	25
6.	Pengangkatan Jurusita	0	88	88
7.	Lepas Jabatan	0	12	12
Total				1.244

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI telah melakukan kegiatan promosi dan mutasi SDM teknis di lingkungan Ditjen Badilag dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Mutasi dan Promosi SDM Nonteknis Ditjen Badilag Tahun 2021**

No.	Jabatan	Promosi/ Mutasi Keluar	Promosi/ Mutasi Masuk	Mutasi/Rotasi Lngkup Ditjen
1.	Eselon III	2	0	8
2.	Eselon IV	0	0	17
3.	Fungsional	7	1	0
4.	Pelaksana	0	0	3
Total		9	1	28

Terdapat dua mekanisme kenaikan pangkat di lingkungan Ditjen Badilag, yaitu kenaikan pangkat otomatis (KPO) dan kenaikan pangkat pilihan (non-KPO). Sepanjang tahun 2021 sebanyak 4 (empat) pegawai telah diproses melalui

mekanisme KPO dan sebanyak 20 (dua puluh) pegawai telah diproses melalui mekanisme non-KPO.

**Tabel Kenaikan Pangkat SDM nonteknis Ditjen Badilag Tahun 2021**

No.	Kepangkatan	Jumlah
1	Kenaikan Pangkat Otomatis	4
2	Kenaikan Pangkat Pilihan	20
Total		24

Selain itu, Ditjen Badilag telah menyelesaikan proses kenaikan pangkat panitera, jurusita, dan jurusita pengganti peradilan agama sejumlah 705 orang melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Usulan kenaikan pangkat dilakukan melalui aplikasi Docudigital yang memungkinkan usul kenaikan pangkat hingga pencetakan persetujuan teknis kenaikan pangkat dengan tidak menggunakan dokumen fisik. Selain itu, pada tahun ini terdapat 3 SDM nonteknis Ditjen Badilag yang memasuki masa pensiun pada tahun 2021.

**Tabel Pensiun SDM Non Teknis Ditjen Badilag Tahun 2021**

No.	Jabatan	Pumstugas/ Pensiun
1.	Eselon IV	3
Total		3

Ditjen Badilag juga telah melakukan promosi dan mutasi (TPM) terhadap 1.403 hakim peradilan agama yang dilaksanakan dalam 4 tahap sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

**Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Agama Tahun 2021**

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Jumlah
1.	Rapat TPM 1	14 Januari 2021	398
2.	Rapat Pimpinan Mahkamah Agung	16 Juni 2021	22
3.	Rapat TPM 2	22 Juni 2021	487
4.	Rapat TPM 3	10 Agustus 2021	496
Total			1.403

Selain itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah melaksanakan kenaikan pangkat dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Kenaikan Pangkat Hakim Peradilan Agama Tahun 2021**

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Jumlah
1.	Kenaikan Pangkat Hakim	April 2021	383
		Oktober 2021	422
<b>Total</b>			<b>805</b>

Pada tahun ini terdapat 152 Hakim peradilan agama yang memasuki masa pensiun dan 47 orang Hakim di lingkungan Peradilan Agama yang meninggal dunia selama tahun 2021.

**Tabel Pensiun Hakim Peradilan Agama Tahun 2021**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pensiun	152
2.	Meninggal Dunia	47
<b>Total</b>		<b>805</b>

Ditjen Badilag menyelenggarakan 2 periode rapat tim dan mengimplementasikan hasil promosi mutasi dengan total yang dipromosi/dimutasi berjumlah 1.053 orang dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Agama Tahun 2021**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Panitera PTA/MS Aceh	13
2.	Panitera Muda PTA/MS Aceh	16
3.	Panitera Pengganti PTA/MS Aceh	75
4.	Panitera PA/MS Kelas IA	31
5.	Panitera Muda PA/MS Kelas IA	71
6.	Panitera Pengganti PA/MS Kelas IA	126
7.	Panitera PA/MS Kelas IB	44
8.	Panitera Muda PA/MS Kelas IB	122
9.	Panitera Pengganti PA/MS Kelas IB	65
10.	Panitera PA/MS Kelas II	77

No.	Jabatan	Jumlah
11.	Panitera Muda PA/MS Kelas II	154
12.	Panitera Pengganti PA/MS Kelas II	24
13.	Pemberhentian Panitera Pengganti	4
14.	Jurusita PA/MS Kelas IA	61
15.	Jurusita Pengganti PA/MS Kelas IA	21
16.	Jurusita PA/MS Kelas IB	41
17.	Jurusita Pengganti PA/MS Kelas IB	17
18.	Jurusita PA/MS Kelas II	50
19.	Jurusita Pengganti PA/MS Kelas II	39
20.	Pemberhentian Jurusita	2
<b>Total</b>		<b>1.053</b>

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

Pada tahun 2021 hasil dari rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badimiltun) Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

**Tabel Jumlah SDM Non Teknis Ditjen Badimiltun Tahun 2021**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon I	1
2.	Eselon II	3
3.	Eselon III	15
4.	Eselon IV	45
5.	Pelaksana	12 PNS 7 TNI
6.	PPNPN	21
<b>Total</b>		<b>104</b>

**Tabel Promosi SDM Nonteknis Ditjen Badimiltun Tahun 2021**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	1
2.	Pelaksana	6
<b>Total</b>		<b>15</b>

Tabel Mutasi SDM Nonteknis SDM Ditjen Badilmiltun Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	1
3.	Eselon IV	5
4.	Pelaksana	32
<b>Total</b>		<b>39</b>

Tabel Kenaikan Pangkat SDM Nonteknis Ditjen Badilmiltun Tahun 2021

No.	Kepangkatan	Jumlah
1.	Kenaikan Pangkat Otomatis	2
2.	Kenaikan Pangkat Pilihan	12
<b>Total</b>		<b>14</b>

Tabel Pensiun SDM Pegawai Nonteknis Ditjen Badilmiltun Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	1
2.	Eselon IV	6
<b>Total</b>		<b>7</b>

Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Militer Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kadilmiltama	1
2.	Wakadilmiltama	1
3.	Hakim Militer Utama	4
4.	Kadilmilti	3
5.	Waka Dilmilti	6
6.	Panmudmil MA RI	1
7.	Hakim Tinggi	18
8.	Kadilmil	17
9.	Wakadilmil	13
10.	Hakim Militer	33
11.	Hakim Yustisial	1
<b>Total</b>		<b>98</b>

Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Militer Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Panitera Pengganti Dilmiltama	1
2.	Panmud Pidana Dilmilti	2
3.	Panitera Hukum Dilmilti	2
4.	Panmud TUM Dilmilti	3
5.	Panitera Pengganti Dilmilti	5
6.	Panitera Dilmil	12
7.	Panmud Pidana Dilmil	10
8.	Panmud Hukum Dilmil	2
9.	Panitera Pengganti Dilmil	11
<b>Total</b>		<b>147</b>

Tabel Kenaikan Pangkat Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Militer Tahun 2021

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Kenaikan Pangkat Hakim	17
2.	Kenaikan Pangkat Panitera	8
<b>Total</b>		<b>25</b>

Tabel Pensiun Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Militer Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim Militer Utama	1
2.	Hakim Militer Tinggi	7
3.	Hakim Militer	3
4.	Panmud Dilmilti	1
5.	Panitera Pengganti Dilmil	2
<b>Total</b>		<b>14</b>

**Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021**

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan	Jumlah
1.	Rapat Pimpinan	18 Januari 2021	Hakim Tk. Pertama	2
2.	Rapat TPM ke-1	22 Juni 2021	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding	76 8
3.	Rapat TPM ke-2	8 September 2021	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding	1 5
4.	Rapat TPM ke-3	26 Oktober 2021	Hakim Tk. Pertama	46
Total				138

**Tabel Kenaikan Pangkat Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021**

No.	Kepangkatan	Jumlah
1.	Kenaikan Pangkat Otomatis	59
2.	Kenaikan Pangkat Pilihan	15
3.	Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	14
Total		88

**Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Panitera Tingkat Pertama	8
2.	Panitera Muda Tingkat Pertama	22
3.	Panitera Pengganti Tingkat Pertama	26
4.	Jurusita Pengganti Tingkat Pertama	8
5.	Panitera Muda Tingkat Banding	3
6.	Panitera Pengganti Tingkat Banding	4
7.	Demosi Jabatan Tingkat Pertama	2
Total		73

<sup>\*)</sup> Catatan : Demosi/turun jabatan: Wakil Panitera menjadi Panitera Pengganti

**Tabel Pensiun Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pensiun	8
2.	Meninggal Dunia	5
Total		13

**Tabel Kenaikan Pangkat Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021**

No.	Kepangkatan	Jumlah
1.	Kenaikan Pangkat Otomatis	47
2.	Kenaikan Pangkat Pilihan	14
Total		61

## BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN

Pada tahun 2021 Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI melakukan promosi dan mutasi dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Mutasi Hakim Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2021**

No.	Jabatan	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar
1.	Hakim Tinggi/Hakim Yustisial	9	3
2.	Pelaksana	12	1
Total		21	4

**Tabel Promosi SDM Non Teknis Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2021**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon IV	5
2.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	3
3.	Analisis Kepegawaian	1
Total		9

## BADAN PENGAWASAN

Tabel Promosi dan Mutasi Hakim pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2021

No.	Promosi dan Mutasi	Jumlah
1.	Hakim Tinggi	18
2.	Hakim Yustisial	13
Total		31

Tabel Promosi dan Mutasi Jabatan Fungsional pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2021

No.	Promosi dan Mutasi	Jumlah
1.	Auditor Muda	3
2.	Analisis Kepegawaian Muda	1
3.	Analisis Kepegawaian Pertama pada Badan Pengawasan MARI	1
4.	Pranata Komputer Terampil	1
Total		6

## PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

Tahun 2021 Mahkamah Agung melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui mekanisme seleksi terbuka dengan menjangkau dari lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta instansi lainnya. Tahapan pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sebagai berikut:

- 1) pengumuman,
- 2) pendaftaran secara daring,
- 3) seleksi administratif,
- 4) pengumuman hasil seleksi administratif
- 5) penelusuran rekam jejak,
- 6) *assessment center*;
- 7) pengumuman hasil *assessment center*;
- 8) penulisan makalah dan bahan presentasi makalah,
- 9) penilaian kompetensi (presentasi dan wawancara), dan
- 10) pengumuman hasil seleksi.

Tabel Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah Pendaftaran	Seleksi Administratif	Assessment Center	Formasi
1.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	4	3	3	1
2.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	10	9	8	1
3.	Kepala Biro Hukum dan Humas	13	11	11	1
4.	Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung	8	6	6	1
5.	Sekretaris Pengadilan Militer Utama	4	2	2	1
6.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Semarang	13	12	11	1
7.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru	9	4	3	1
8.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palembang	19	11	10	1
9.	Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi I Medan	8	3	3	1
10.	Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi	6	2	2	1
Total		94	63	59	10

Selain jabatan di atas, Mahkamah Agung juga melaksanakan kegiatan seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama tahun 2021 yang saat ini masih berlangsung.

Adapun jabatan tersebut, antara lain, tampak pada tabel di bawah ini.

**Tabel Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Mahkamah Agung Tahun 2021**

No.	Jabatan	Jumlah Pelamar	Lulus Seleksi Administrasi
1.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	8	8
2.	Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan	3	3
3.	Kepala Badan Pengawasan	6	6
4.	Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan	8	6
5.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar	4	3
6.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Pontianak	14	12
7.	Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus	5	4
8.	Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus	8	5
Total		56	47

Adapun pelaksana tahapan selanjutnya untuk seleksi jabatan pimpinan tinggi ini adalah *Assesment Center*. Hal itu mengacu pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17337/B-NK.02.02/SD/I/2021 tanggal 9 Desember 2021 perihal Fasilitas Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural Seleksi Terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa pelaksanaannya akan diadakan pada pertengahan Januari 2022.

## PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU

Terdapat 3 (tiga) mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional ASN, yaitu pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian/*inpassing*. Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional melalui jalur CPNS. Sementara itu, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain merupakan pengangkatan dalam jabatan fungsional yang dilakukan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan

struktural atau jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional, sedangkan pengangkatan penyesuaian/*inpassing* adalah pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pranata Keuangan APBN	123
2.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	97
3.	Analisis Kepegawaian	39
4.	Pranata Komputer	12
5.	Pustakawan	3
6.	Analisis Kebijakan	1
7.	Perencana	3
8.	Pranata Peradilan	232
9.	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur	6
10.	Staf Khusus Pimpinan	12
Total		528

## FIT AND PROPER TEST

Uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) telah dijadikan sebagai mekanisme standar dalam seleksi calon pejabat struktural dan pimpinan pengadilan. Sepanjang tahun 2021, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya telah menyelenggarakan *uji kepatutan dan kelayakan* untuk mendapatkan calon pejabat struktural dan pimpinan pengadilan yang memiliki kompetensi manajerial, sosiokultural, dan teknis yang sesuai dengan persyaratan jabatan.

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan *uji kepatutan dan kelayakan* dengan menggunakan dasar penilaian kompetensi teknis dan integritas untuk pengisian posisi pimpinan pada pengadilan tinggi, pengadilan negeri kelas IA, IB, dan II. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk penguatan kepemimpinan pada setiap tingkatan

pengadilan. Pada tahun 2021 dilaksanakan *uji kepatutan dan kelayakan* bagi calon pimpinan pengadilan tingkat pertama, calon panitera pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama, calon asisten hakim agung, serta calon hakim yustisial pada Humas Mahkamah Agung RI dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel *Fit and Proper Test* Calon Pimpinan, Panitera, dan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2021**

No.	Uji Kepatutan dan Kelayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
1.	Calon Pimpinan PN Kelas IA	44	22
2.	Calon Pimpinan PN Kelas IB Gel I	53	26
3.	Calon Pimpinan PN Kelas IB Gel II	49	30
4.	Calon Pimpinan PN Kelas II Gel I	55	31
5.	Calon Pimpinan PN Kelas II Gel II	59	25
6.	Calon Pimpinan PN Kelas II Gel III	66	42
7.	Calon Asisten Hakim Agung	47	27
8.	Calon Hakim Yustisial pada Humas MA RI	20	14
9.	Calon Asisten Hakim Agung	27	16
10.	Panitera PT	15	12
11.	Panitera IA Khusus	19	10
12.	Panitera IA	24	12
13.	Panitera IB	92	65
Total		570	332

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Dalam rangka menghasilkan calon-calon pimpinan pengadilan di lingkungan peradilan agama yang memiliki kualifikasi, kompetensi, integritas, dan kemampuan manajemen kepemimpinan yang baik, pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah menyelenggarakan Kegiatan *uji Kepatutan dan Kelayakan* secara virtual untuk Calon Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama, Calon Pimpinan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama Kelas IA, Kelas IB dan Kelas II, dan Calon Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini merupakan implementasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 tanggal 10 April

2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan/*Fit and Proper Test* bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Calon Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim di lingkungan Peradilan Agama yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 365 orang, dinyatakan lulus sebanyak 343 orang atau (94%) dan tidak lulus sebanyak 22 orang (6%) sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini

**Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Pimpinan Peradilan Agama dan Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung Tahun 2021**

No.	Uji Kepatutan dan Kelayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
1.	Calon Wakil Ketua MS Aceh/PTA	23	20
2.	Calon Wakil Ketua MS/PA Kelas IA	78	69
3.	Calon Wakil Ketua MS/PA Kelas IB	109	105
4.	Calon Wakil Ketua MS/PA	147	141
5.	Calon Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI	8	8
Total		365	343

Dari 343 orang yang dinyatakan lulus tersebut, sebanyak 299 orang telah ditempatkan, 1 orang meninggal dunia, dan 43 orang akan ditempatkan pada tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan Pimpinan Pengadilan dan Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung yang Belum ditempatkan Tahun 2021**

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Calon Wakil Ketua MS Aceh/PTA	20
2.	Calon Wakil Ketua MS/PA Kelas IA	0
3.	Calon Wakil Ketua MS/PA Kelas IB	18
4.	Calon Wakil Ketua MS/PA Kelas II	2
5.	Calon Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI	3
Total		43

Selain itu, guna mengisi kekosongan formasi pada jabatan panitera muda di sejumlah satuan kerja di lingkungan peradilan agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melaksanakan lelang jabatan panitera muda pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dengan total 92 jabatan panitera muda pada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah kelas II dan diikuti oleh 14 orang tenaga teknis.

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah melaksanakan *Uji Kepatutan dan Kelayakan* bagi Calon Pimpinan Tingkat Banding, Calon Pimpinan Militer Tipe A, Calon Pimpinan Militer Tipe B, dan Calon Hakim Militer Tinggi dengan perincian sebagai berikut.

Tabel *Fit and Proper Test* Calon Pimpinan Peradilan Militer Tahun 2021

No.	Uji Kepatutan dan Kelayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
1.	Calon Pimpinan Tingkat Banding	9	8
2.	Calon Pimpinan Dilmil Tipe A	12	8
3.	Calon Pimpinan Dilmil Tipe B	9	7
4.	Calon Hakim Militer Tinggi	9	9
Total		39	32

Untuk mengisi kekosongan jabatan pada peradilan tata usaha negara, Ditjen Badilmiltun tahun 2021 telah melaksanakan *Uji Kepatutan dan Kelayakan* Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Calon Hakim Yustisial (Asisten Nonpanitera Pengganti) Mahkamah Agung, dan calon pejabat struktural kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus s.d 24 Agustus 2021 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2021

No.	Uji Kepatutan dan Kelayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
1.	Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama	32	25
Total		32	25

Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2021

No.	Uji Kepatutan dan Kelayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
1.	Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Banding	9	6
2.	Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama	13	6
Total		22	12

Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Hakim Yustisial Mahkamah Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Uji Kepatutan dan Kelayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
1.	Calon Hakim Yustisial (Asisten Non Panitera Pengganti) Mahkamah Agung	12	8
Total		12	8



## PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020--2024, sasaran pembangunan jangka menengah 2020--2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kukuh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020--2024 tersebut merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin, yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yang urutan pertamanya adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Di bidang manajemen SDM, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif telah membuat arah kebijakan yang sejalan dengan RPJMN Tahun 2020--2024 dan rencana strategis Mahkamah Agung Tahun 2020--2024. Untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program prioritas pelaksanaan kebijakan nasional, di antaranya, dilakukan peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan. Pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan tersebut merupakan pelaksanaan kebijakan nasional pada tahun 2021 yang terdiri atas Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga, Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator, Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, serta Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu.

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM NIAGA

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, Mahkamah Agung

tidak secara spesifik menyinggung mengenai hukum acara singkat dengan pemeriksaan pembuktian sederhana atas persyaratan kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Akibatnya, hingga kini penilaian pembuktian sederhana diserahkan sepenuhnya pada diskresi Hakim Niaga yang mengadili permohonan kepailitan dan PKPU. Guna mendukung kebijakan Mahkamah Agung tersebut dan agar Hakim mampu melakukan diskresi dan memutus secara tepat di bidang perniagaan, Mahkamah Agung, melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, di tahun 2021 melakukan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga kepada 55 orang Hakim.

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM MEDIATOR

Proses penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan tidak hanya memakan waktu yang lama, tetapi juga prosedur yang tidak sederhana dan biaya yang tidak murah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 130 Ayat (1) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*)/154 RBG (*Reglement op de Rechtvordering*) bahwa "*Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan Hakim Ketua mencoba akan memperdamakan mereka.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim mengupayakan perdamaian yang dikenal dengan istilah "dading", yakni, sebagai alternatif penyelesaian sengketa dari jalur non litigasi yang mengintegrasikan proses perdamaian di pengadilan. Ketentuan yang mengamanahkan adanya perdamaian dalam proses persidangan tersebut juga diadopsi oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dimana Hakim didorong untuk mengupayakan perdamaian terhadap perkara yang diperiksanya. Oleh karena itu, Hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran, dan keyakinan kepada para pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana (*win-win solution*), baik dipandang dari segi waktu, biaya, dan tenaga yang dipergunakan dibandingkan perkaranya diselesaikan dengan putusan pengadilan (*win-lose solution*). Keberhasilan seorang Hakim Mediator yang handal setidaknya dapat terlihat dari indikator antara lain:

1. *Fairness*, yaitu menyangkut perhatian Mediator terhadap kesetaraan, pengendalian pihak-pihak yang bertikai, dan perlindungan terhadap hak-hak individu;
2. Kepuasan pihak-pihak yang bertikai, yaitu apakah intervensi Mediator membantu memenuhi tujuan pihak-pihak yang bertikai, memperkecil kerusakan, meningkatkan peran serta, dan mendorong komitmen;
3. Efektivitas umum, seperti kualitas intervensi, permanen tidaknya intervensi, dan dapat tidaknya diterapkan;
4. Efisiensi dalam waktu, biaya, dan kegiatan;
5. Apakah kesepakatan tercapai atau tidak.

Berkenaan dengan perluasan tugas dan kewenangan Hakim yang dapat menjadi Hakim Mediator tersebut, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi setiap Hakim untuk memahami segala hal yang terkait dengan kompetensinya. Hakim wajib selalu berusaha memperkaya wawasan pengetahuannya, baik pengetahuan hukum maupun pengetahuan lain yang merupakan penunjang tugasnya, sebagai sebuah pertanggung-jawab moral dan etikanya. Mahkamah Agung melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan sertifikasi Hakim Mediator kepada sebanyak 548 orang Hakim di tahun 2021. Pendidikan dan Pelatihan ini juga merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional di tahun 2021.

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) TERPADU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang dimaksud menurut perundang-undangan tersebut adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Untuk menangani perkara terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana,

penegak hukum dituntut untuk bersikap responsif terhadap berbagai instrumen hukum dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan undang-undang, perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau korban anak perlu melibatkan pihak lain, antara lain, melibatkan orang tua/wali, lembaga pendamping, Balai Pemasarakatan, Lembaga Bantuan Hukum, Dinas sosial, serta berbagai fasilitas lain yang disebut dalam undang-undang. Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum memiliki karakter tersendiri dan terkadang agak rumit. Oleh karena itu, aparat penegak hukum di samping dibekali pengetahuan dan kompetensi, harus dibekali keahlian khusus, seperti psikologi anak. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu pada tahun 2021 dilaksanakan terhadap 193 orang hakim yang diharapkan dapat menghasilkan sumber daya hakim yang mampu menangani perkara pidana anak secara arif, bijaksana, berempati, bermoral, dan berkeadilan dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP

Sengketa lingkungan hidup mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Sengketa lingkungan hidup merupakan suatu sengketa atas hak yang dijamin di dalam konstitusi, yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping itu, perkara sengketa lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai sengketa yang bersifat struktural, yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan pihak yang memiliki akses terbatas. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup pada tahun 2021 terhadap 174 orang hakim dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring dengan memanfaatkan *system e-Learning* pada Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Pelatihan itu diharapkan dapat menghasilkan sumber daya hakim yang mampu membuat putusan yang berkualitas, bermoral, dan berkeadilan dalam kaitannya dengan perkara lingkungan hidup.



### KONTRIBUSI BADAN PERADILAN DALAM KEMUDAHAN BERUSAHA (EASE OF DOING BUSINESS)

Mahkamah Agung turut berkontribusi dalam peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia. Indikator yang menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung yang berkaitan langsung dengan pengadilan niaga ialah penegakan kontrak (*enforcing contract*) dan penyelesaian kepailitan (*resolving insolvency*). *World Bank Group* secara resmi menghentikan Laporan *Ease of Doing Business* (EoDB) untuk tahun 2021 pada tanggal 16 September 2021 dan akan menyusun pendekatan baru yang dapat dijadikan sebagai parameter penilaian iklim investasi bagi pelaku usaha. Hal itu dilakukan karena terdapat penyimpangan pada laporan tahun 2018 dan 2020 yang melibatkan negara Tiongkok dan Saudi Arabia. Laporan EoDB terakhir dibuat pada tahun 2020. Secara umum Indonesia berada pada peringkat 73 dari 190 negara. Indikator penegakan kontrak (*enforcing contract*) berada pada peringkat 139 dan penyelesaian kepailitan (*resolving insolvency*) berada pada peringkat 38. Meskipun telah berakhir, pemerintah Indonesia tetap mendorong agenda pembaruan pada indikator-indikator Indeks EoDB, seperti yang dilakukan

oleh Mahkamah Agung pada tahun 2021, yaitu melakukan beberapa kegiatan secara *hybrid* (daring dan tatap muka secara bersamaan), seperti kegiatan berikut ini.

Webinar dengan tema "Meningkatkan Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia Perspektif Peradilan" pada 23 April 2021 yang dihadiri oleh 252 peserta. Webinar ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi pembaruan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung guna mendukung peningkatan Indeks EoDB di Indonesia. Y.M. Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menjadi pembicara kunci dalam Webinar tersebut. Selain itu, pembacaan laporan disampaikan oleh Y.M. Ketua Kamar Perdata, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dengan narasumber Hakim Agung Y.M. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D., Ir. Yuliot, M.M., (Deputi Pengembangan Iklim Investasi Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan Lucas Prakoso, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum).

Sosialisasi, koordinasi, dan evaluasi Kemudahan Berusaha di 37 provinsi di Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan tujuan mengetahui kemajuan implementasi kemudahan berusaha di wilayah-wilayah yang menjadi survei World Bank Group pada tanggal 26 November 2021 yang dihadiri oleh 700-an orang yang merupakan seluruh perwakilan satuan kerja pengadilan di Indonesia. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Hakim Agung Y.M. Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D., Ir. Dendy Apriandi (Direktur Deregulasi Badan Koordinasi Penanaman Modal), dan Brigjen. Dr. Arudji Anwar, S.H., (Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan).

## PELATIHAN YANG MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA

Guna mendukung kelancaran proses kemudahan berusaha dan berinvestasi (*ease of doing business*) di Indonesia, Mahkamah Agung melalui Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI telah mengembangkan beberapa materi pendidikan dan pelatihan tentang *legal technical capacity* untuk hakim dan panitera pengganti di lingkungan pengadilan niaga tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kemudahan berusahaan (*ease of doing business*). Beberapa di antaranya ialah Mahkamah Agung melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga dan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis mengenai Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel Pelatihan yang Mendukung Kemudahan Berusaha Tahun 2021

No.	Kegiatan	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga	50	55	110
2.	Bimbingan Teknis Pedoman Penyelesaian Perkara HKI	44	44	100
Total		44	44	100

## RENCANA KE DEPAN

Dalam rangka menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang pembangunan SDM untuk mewujudkan SMART ASN pada seluruh aparaturnya Mahkamah Agung sebagai pilar utama terwujudnya birokrasi berkelas dunia sesuai dengan visi *Grand Design* Reformasi Birokrasi, arah kebijakan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya terkait dengan pengembangan SDM aparaturnya adalah optimalisasi pengelolaan SDM berdasarkan sistem merit, antara lain melalui:

1. sistem rekrutmen, promosi, dan mutasi yang berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang terlaksana secara transparan, objektif, akuntabel, dan partisipatif;
2. optimalisasi peran dan fungsi *Assessment Center* Mahkamah Agung untuk penyusunan indeks profesionalitas dan pelaksanaan program *talent pool* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
3. pemenuhan dan penyebaran SDM aparaturnya sesuai dengan analisis beban kerja; dan
4. optimalisasi pelaksanaan *reward and punishment*.